



ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

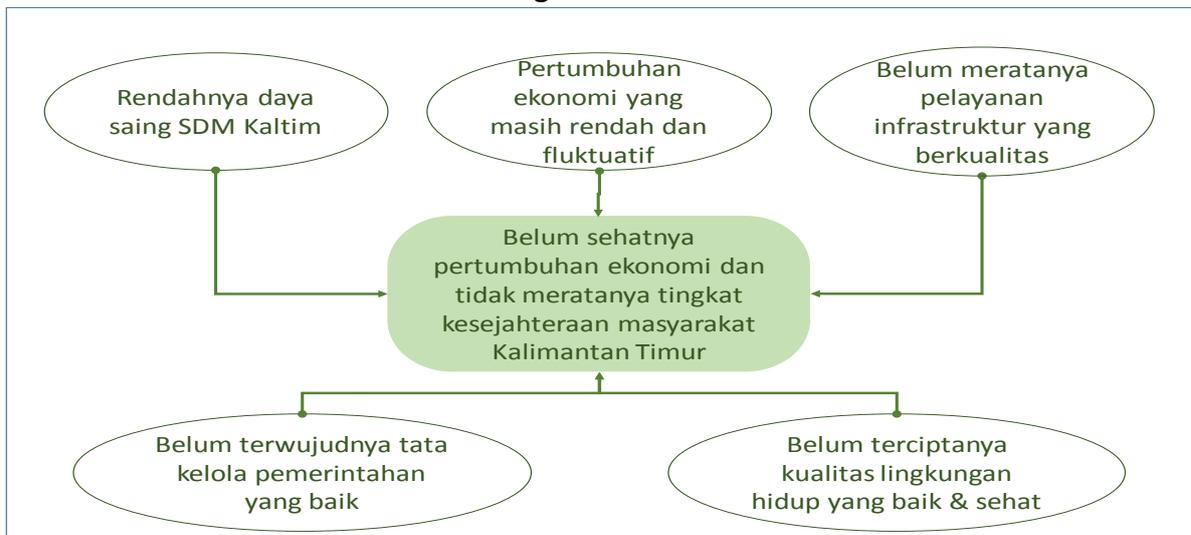
Analisis isu-isu strategis merupakan pemahaman permasalahan pembangunan dan isu-isu yang relevan sebagai pijakan penting dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum sesuai harapan. Sedangkan, isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Suatu analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah dan panjang. Dengan demikian, rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur lima tahun mendatang.

4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Permasalahan pembangunan daerah menjadi salah satu rujukan penting dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan. Permasalahan yang dirumuskan dalam RPJMD merupakan inti dari berbagai permasalahan sektoral yang digabung menjadi satu rumusan masalah pembangunan. Suatu kebijakan pembangunan harus memiliki dasar rumusan permasalahan yang relevan sehingga kebijakan publik memiliki pertimbangan matang sebagai dasar penentuan prioritas pembangunan.

Prioritas pembangunan yang baik akan menciptakan agenda utama pembangunan dan memberikan harapan baru bagi pemerintah dalam 5 (lima) tahun periode RPJMD. Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan untuk masing-masing aspek dan urusan pemerintahan serta kesepakatan dari para pemangku kepentingan, maka diketahui terdapat lima permasalahan utama pembangunan Provinsi Kalimantan Timur yaitu: **rendahnya daya saing SDM Provinsi Kalimantan Timur, pertumbuhan ekonomi yang masih rendah dan fluktuatif, belum terpenuhinya pelayanan infrastruktur, belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, dan belum terciptanya kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat.** Kelima permasalahan utama tersebut menjadi pemicu utama belum maksimalnya pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Timur yang ditandai dengan belum meratanya kesejahteraan masyarakat.

Gambar 4. 1
Permasalahan Utama Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur



1. Rendahnya Daya Saing SDM Provinsi Kalimantan Timur

Daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) berhubungan dengan bagaimana kualitas masyarakat Provinsi Kalimantan Timur berperan di berbagai sektor penting dalam perekonomian daerah. Rendahnya daya saing SDM Provinsi Kalimantan Timur memiliki masalah inti yakni rendahnya kualitas SDM. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk memecahkan permasalahan terkait kualitas SDM yang akan berdampak pada peningkatan daya saing masyarakat Provinsi Kalimantan Timur.

Indikasi untuk mengukur kualitas SDM antara lain dengan mengukur sejauh mana SDM Provinsi Kalimantan Timur dapat bersaing dengan SDM wilayah lain, sekurang-kurangnya di “negeri” sendiri. Selain itu, masih dominannya produk primer yang menjadi andalan ekspor menunjukkan bahwa kemandirian lokal SDM masih menjadi kendala utama pembangunan karena belum mampu memberi nilai tambah terhadap sumber daya alam yang dihasilkan.

Rendahnya kualitas SDM Provinsi Kalimantan Timur berhubungan dengan permasalahan pokok antara lain rendahnya akses dan mutu pendidikan, rendahnya akses dan mutu pelayanan kesehatan, dan rendahnya pendapatan per kapita yang dipengaruhi oleh sektor ekstratif skala besar. Permasalahan rendahnya akses dan mutu pendidikan dapat dilihat dari angka melek huruf di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 97,55 persen pada tahun 2012 dan angka rata-rata lama sekolah 9,22 tahun. Oleh karena itu, untuk memperbaiki daya saing SDM di Provinsi Kalimantan Timur pada masa datang, perlu perhatian khusus dari pemerintah terkait pendidikan, terutama dari segi kualitas maupun infrastruktur penunjangnya.

Permasalahan berikutnya yang memengaruhi rendahnya daya saing SDM Provinsi Kalimantan Timur adalah akses dan mutu pelayanan kesehatan. Peningkatan layanan kesehatan sangat perlu dilakukan mengingat kesehatan merupakan kunci utama individu

dalam melaksanakan aktivitasnya. Angka harapan hidup di Provinsi Kalimantan Timur cenderung naik perlahan dimana pada tahun 2011 sebesar 71,40 tahun dan meningkat sebesar 0,18 tahun menjadi 71,58 tahun. Selain itu masih tingginya angka kematian ibu yakni sebesar 101 juga perlu diberi perhatian khusus meskipun angka tersebut jauh berkurang dari tahun 2007 dimana terdapat 128 kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup. Mutu pelayanan kesehatan juga perlu ditingkatkan sampai ke wilayah terpencil mengingat penduduk dengan keluhan kesehatan sebesar 22,33 persen pada tahun 2013 tersebar di seluruh sudut wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Permasalahan turunan yang juga dapat memengaruhi rendahnya daya saing SDM Provinsi Kalimantan Timur adalah pendapatan per kapita terhadap sektor ekstratif dalam skala besar. Pendapatan per kapita di Provinsi Kalimantan Timur cukup berfluktuatif dimana pada tahun 2008 sebesar 36,56 juta rupiah turun menjadi 32,09 juta rupiah di tahun 2009. Namun pada beberapa tahun terakhir cenderung mengalami kenaikan dimana pada tahun 2011 menjadi sebesar 41,42 juta rupiah dan meningkat sebesar 44,65 juta rupiah di tahun 2012.

Agar rumusan kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan tidak melenceng dari substansinya maka perlu dipahami sumber/akar masalah pada masing-masing masalah pokok. Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan rendahnya daya saing SDM Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Permasalahan: Rendahnya Daya Saing SDM Provinsi Kalimantan Timur

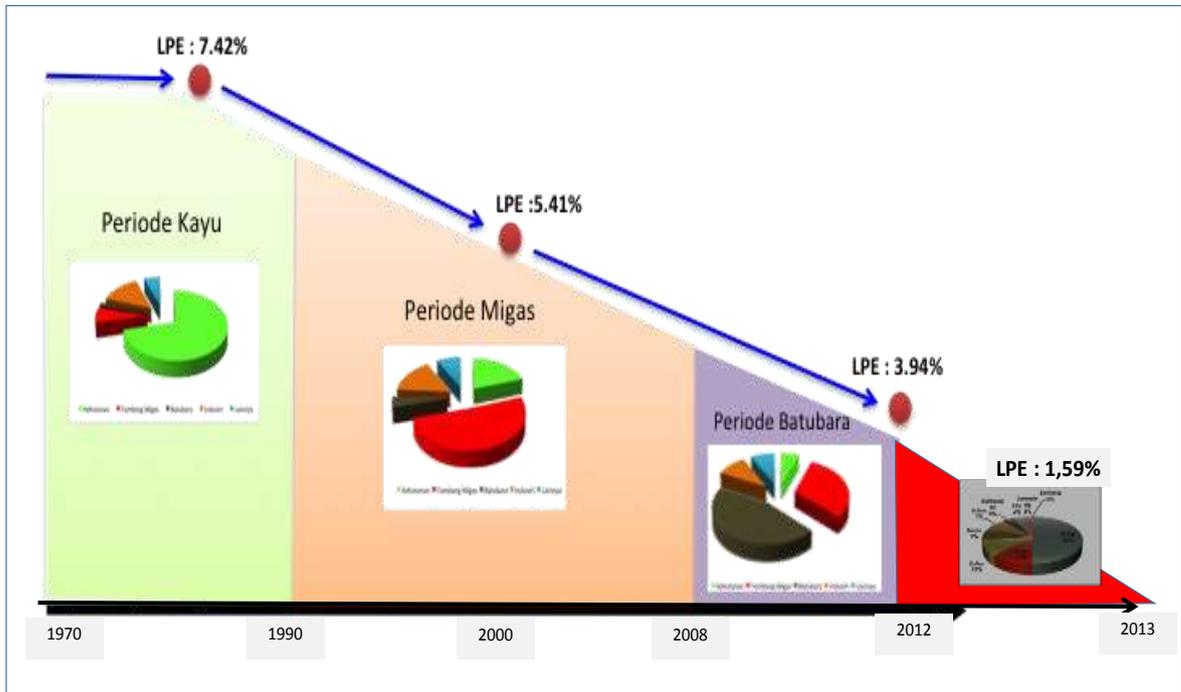
Masalah	Akar Masalah
1) Indeks Pembangunan Manusia yang masih perlu ditingkatkan	<ol style="list-style-type: none">1. Rendahnya kualitas dan pemerataan pendidikan di daerah perbatasan dan terpencil.2. Rendahnya kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan.3. Ketimpangan pendapatan masyarakat yang tinggi.4. Masih rendahnya sarana dan prasarana layanan publik terhadap anak berkebutuhan khusus, anak penyandang disabilitas, dan anak yang bermasalah hukum.
2) Rendahnya akses dan mutu pendidikan	<ol style="list-style-type: none">1. Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan formal maupun non formal yang menjangkau setiap strata masyarakat.2. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan.3. Masyarakat masih menganggap pendidikan mahal dan masih terdapat sekolah yang mengadakan pungutan kepada siswa terutama sekolah swasta dan SMK.4. Adanya anak-anak usia sekolah yang

	<p>membantu orang tua untuk mencari nafkah sehingga meninggalkan bangku sekolah (putus sekolah).</p> <p>5. Distribusi guru belum proporsional di setiap wilayah dengan kualitas yang masih belum sesuai yang diharapkan.</p> <p>6. Belum meratanya sarana dan prasarana pendidikan (belum ada sekolah berasrama terutama di daerah pedalaman, perbatasan, dan terpencil) sehingga akses pendidikan dapat dinikmati semua anak.</p>
3) Akses dan mutu pelayanan kesehatan masih perlu ditingkatkan	<p>1. Belum optimalnya program jamkesmas yang merata ke seluruh masyarakat terutama penduduk ekonomi lemah.</p> <p>2. Kualitas pelayanan kesehatan yang belum efektif dan efisien terhadap pasien.</p> <p>3. Belum maksimalnya kerjasama dengan pihak lain (swasta) yang mampu mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.</p> <p>4. Belum meratanya fasilitas pelayanan kesehatan di daerah pedalaman, perbatasan, dan terpencil.</p> <p>5. Distribusi tenaga medis belum merata terutama di daerah pedalaman, perbatasan, dan terpencil.</p>
4) Pendapatan per kapita yang masih fluktuatif	<p>1. Mutu/kualitas sumber daya manusia yang masih rendah.</p> <p>2. Ketetapan pendapatan berdasarkan Upah Minimum Provinsi belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pemilik tempat kerja (perusahaan, pabrik, dll).</p>

2. Pertumbuhan ekonomi yang rendah dan masih fluktuatif

Pertumbuhan ekonomi menjelaskan berbagai dampak dari kebijakan dan aktivitas ekonomi oleh masyarakat dan pelaku usaha. Di lain pihak, pertumbuhan ekonomi juga memberi dampak lanjutan terutama pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Secara umum, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur dalam beberapa dekade mengalami penurunan sebagaimana terlihat dalam gambar berikut ini.

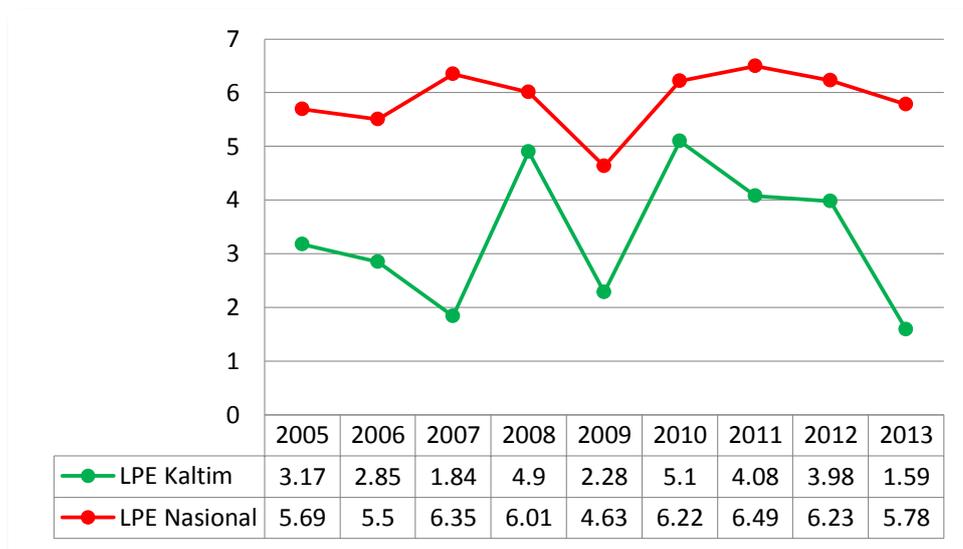
Gambar 4. 2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur Dalam Tiga Dekade Terakhir



Perkembangan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur sejak 40 tahun yang lalu dimana Provinsi Kalimantan Timur telah melalui beberapa fase perkembangan ekonomi yang kurang sehat dan berkualitas sebagaimana ditunjukkan oleh gambar di atas. Penurunan tingkat pertumbuhan dari 7,42 persen pada periode “booming” kayu yang merupakan industri yang padat karya (*labour intensive*) menjadi 5,71 persen pada era migas yang padat modal (*capital intensive*) mengakibatkan pengangguran meningkat hingga diatas 10 persen. Selanjutnya, penurunan laju pertumbuhan ekonomi akibat pergeseran basis ekonomi dari migas ke batu bara berimbas pada meningkatnya pengangguran hingga pada tahun 2007 angka pengangguran berada pada titik tertinggi dalam sejarah ekonomi Provinsi Kalimantan Timur yakni sebesar 12.83 persen.

Selama periode 5-7 tahun terakhir, kinerja perekonomian Provinsi Kalimantan Timur terus mengalami banyak tekanan. Perekonomian daerah bertumbuh pada laju rata-rata 3,47 persen per tahun, di bawah laju pertumbuhan rata-rata wilayah Kalimantan dan nasional yang masing-masing sebesar 4,17 persen dan 5,89 persen per tahun. Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur meningkat dari 3,17 persen pada tahun 2005 menjadi 3,98 persen pada tahun 2012 namun mengalami menurun drastis hingga mencapai 1,59 persen pada tahun 2013. Selain itu, fluktuasi laju pertumbuhan ekonomi terjadi pada tahun 2007 dan 2009 yang diakibatkan oleh terjadinya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan krisis ekonomi global. Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang dimulai dari tahun 2010 (5,10%) hingga tahun 2013 (1,59%) perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah terutama sektor-sektor yang memiliki andil besar (pertambangan dan penggalan) dalam pembentukan PDRB Provinsi Kalimantan Timur.

Gambar 4.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional
Tahun 2005-2013



Sumber: Statistik Nasional dan Kalimantan Timur Dalam Angka, 2013

Laju pertumbuhan ekonomi yang melambat banyak dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi sektor pertambangan dan penggalan selaku sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam perekonomian Provinsi Kalimantan Timur. Penurunan yang drastis pada tahun 2013 pun dipicu oleh pertumbuhan ekonomi negatif sektor pertambangan dan penggalan (-0,23%). Bahkan sektor yang memiliki kontribusi terbesar kedua perekonomian Provinsi Kalimantan Timur yakni sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan ekonomi negatif selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Tingkat pengangguran terbuka yang tinggi mengindikasikan bahwa sektor-sektor utama penggerak perekonomian daerah belum mampu menyerap tenaga kerja lebih besar. Disamping itu, berbagai lapangan kerja juga masih banyak dipenuhi oleh SDM dari luar Provinsi Kalimantan Timur karena tidak mampu dipenuhi oleh SDM lokal. Dari sisi angkatan kerja, data menunjukkan sebagian besar angkatan kerja di Provinsi Kalimantan Timur adalah SLTP, yakni mencapai proporsi 84 persen dari total angkatan kerja di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2012. Sedangkan angkatan kerja dengan tingkat pendidikan level perguruan tinggi baru mencapai 5 persen. Kondisi ini mencerminkan kualitas tenaga kerja di wilayah Provinsi Kalimantan Timur relatif masih rendah. Dengan demikian, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus melakukan peningkatan produktivitas sektor-sektor yang mampu menyerap tenaga kerja relatif lebih tinggi dan sesuai dengan kondisi masyarakat Provinsi Kalimantan Timur.

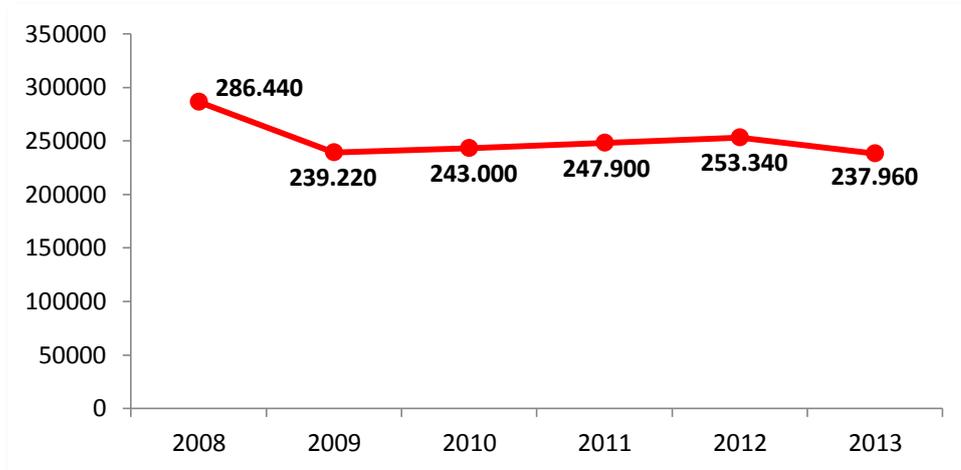
Kualitas SDM (angkatan kerja) menentukan kemampuan tenaga kerja dalam memenuhi tuntutan spesifikasi tenaga kerja dari sektor ekonomi. Dengan basis ekonomi wilayah yang padat modal dan membutuhkan kemampuan yang cukup tinggi, kondisi pasar tenaga kerja lokal terbilang rentan dalam memenuhi kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan sektor-sektor utama perekonomian Provinsi Kalimantan Timur.

Pada tahun 2013, penyerapan tenaga kerja paling dominan berada di sektor pertanian dengan persentase sebesar 26,61 persen, sektor perdagangan 21,63 persen, dan jasa 20,86 persen. Sedangkan penyerapan tenaga kerja sektor pertambangan dan penggalian yang merupakan sektor andalan hanya sebesar 10,15 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun sektor pertambangan dan penggalian memiliki kontribusi tertinggi dalam perkembangan perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur, namun daya serap tenaga kerjanya masih kurang efektif jika dilihat dari sisi ketenagakerjaan. Hal itu disebabkan karena sektor ini merupakan sektor padat modal serta membutuhkan *skill* yang cukup tinggi dari tenaga kerjanya.

Kualitas tenaga kerja yang tinggi merupakan kebutuhan dasar pembangunan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Tenaga kerja yang mempunyai *skill*, handal, dan dapat dipercaya dalam mengelola sumber daya dengan maksimal akan menjadikan daya saing tenaga kerja lebih *powerfull*. Efek dari kondisi tersebut meningkatkan penyerapan tenaga kerja masyarakat lokal dan secara otomatis akan meningkatkan daya saing SDM Provinsi Kalimantan Timur.

Salah satu permasalahan pokok di Provinsi Kalimantan Timur yaitu penurunan tingkat kemiskinan yang berjalan lambat. Hal ini sejalan dengan permasalahan pertumbuhan ekonomi dan pengangguran sehingga tingkat kemiskinan daerah mengalami perlambatan penurunan. Secara umum, selama periode 2008-2012, persentase penduduk miskin menurun namun jika dilihat angka absolutnya maka dari 2009 hingga 2012 terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin meski tidak signifikan hingga akhirnya menurun kembali menjadi 237.960 jiwa pada tahun 2013. Oleh karena itu, tantangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur saat ini harus dapat menghadapi dan menyasati tingginya tingkat kemiskinan terutama di perdesaan. Hal ini dikarenakan meski terjadi penurunan tingkat kemiskinan namun berjalan relatif lambat, sehingga menegaskan adanya stagnasi pertumbuhan sektor pertanian dan kegiatan ekonomi lainnya di daerah perdesaan terutama wilayah pedalaman.

Gambar 4.4
Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Timur, 2008 -2013

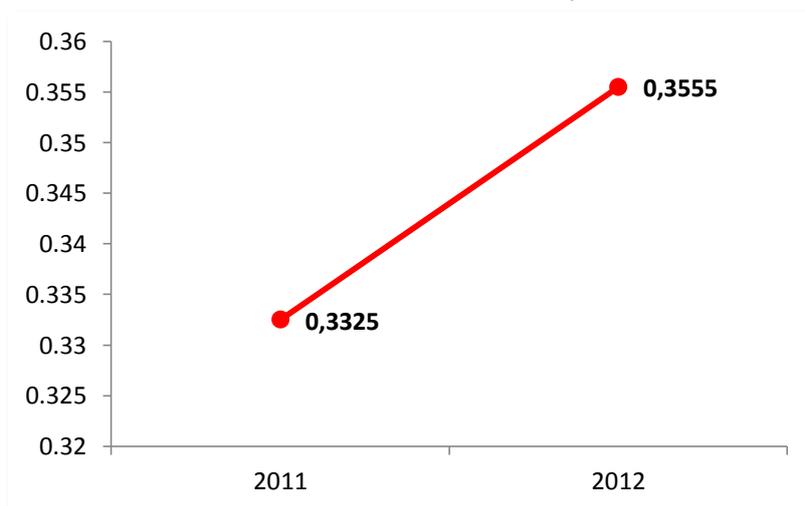


Sumber: Kalimantan Timur Dalam Angka, 2013

*) Data Prov. Kalimantan Timur termasuk Prov. Kalimantan Utara (Kondisi Bulan Maret)

Tingginya kesenjangan pendapatan sangat memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur. Ketimpangan pendapatan Provinsi Kalimantan Timur secara keseluruhan masih berada dalam batas “wajar” yaitu sebesar 0,3555 di tahun 2012. Meskipun begitu, pemerataan pendapatan di Provinsi Kalimantan Timur dari tahun ke tahun perlu diperhatikan dan diawasi lebih lanjut mengingat tingginya sektor-sektor padat modal yang berperan dalam pembentukan PDRB.

Gambar 4.5
Indeks Gini Provinsi Kalimantan Timur, 2011-2012



Sumber: BPS Kalimantan Timur

*Data Prov. Kalimantan Timur termasuk Prov. Kalimantan Utara

Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah dan masih fluktuatif dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2

Rumusan Permasalahan: Pertumbuhan Ekonomi yang Rendah dan Masih Fluktuatif

Masalah	Akar Masalah
(1) Penurunan tingkat kemiskinan yang berjalan lambat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pengendalian harga barang kebutuhan pokok masyarakat (pangan, sandang, dan papan). 2. Belum maksimal dan meratanya subsidi terhadap kebutuhan dasar masyarakat (pendidikan, kesehatan, dan ekonomi). 3. Pemberdayaan dan rehabilitasi masyarakat dalam pengentasan kemiskinan belum maksimal.
(2) Tingginya tingkat pengangguran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya perluasan kesempatan kerja masyarakat terutama yang memiliki pendidikan/keterampilan rendah. 2. Belum optimalnya pelatihan bagi masyarakat dalam mengembangkan kemampuan berwirausaha. 3. Masih tingginya <i>mindset</i> bahwa bekerja setelah lulus sekolah adalah menjadi pegawai/karyawan/buruh. 4. Masyarakat berpendidikan menengah ke atas masih memiliki idealisme harus bekerja di bidang tertentu atau dengan gaji tertentu. 5. Belum maksimalnya peningkatan kualitas tenaga kerja yang berakibat pada kompleksnya penyaluran tenaga kerja.
(3) Menurunnya Indeks Gini (Belum meratanya pendapatan masyarakat)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum maksimalnya dan optimalnya pengembangan usaha pada sektor produktif bagi masyarakat 2. Rendahnya kualitas sumber daya manusia pada masyarakat ekonomi lemah
(4) Rendahnya daya beli masyarakat dan tingginya angka inflasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naiknya harga barang kebutuhan masyarakat pada hari-hari besar dan diakhir tahun. 2. Tingginya harga BBM dan TDL. 3. Minimnya intervensi pemda terhadap gejolak harga. 4. Lemahnya rantai distribusi komoditi strategis.
(5) Pertumbuhan ekonomi yang berjalan lambat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya dukungan hubungan pemerintah daerah terhadap iklim investasi yang kondusif. 2. Struktur ekonomi masih didominasi sektor pertambangan & industri pengolahan migas. 3. Pusat pertumbuhan ekonomi masih terpusat pada kabupaten/kota yang memiliki keunggulan SDA dan infrastruktur dasar yang relatif baik. 4. Kurangnya dukungan pemerintah dalam pemerataan pembangunan infrastruktur dasar.
(6) Kurang maksimalnya kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum maksimalnya penggalan potensi sektor pertanian di Provinsi Kalimantan Timur (rendahnya produk sektor pertanian). 2. Kebijakan pemerintah terkait sektor penggalan dan pertambangan menyebabkan rusaknya lahan potensi pertanian. 3. Kurangnya kerjasama pemerintah dengan masyarakat terutama petani dalam pengembangan potensi

	<p>pertanian.</p> <p>4. Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM sektor pertanian</p> <p>5. Infrastruktur pertanian belum memadai</p>
(7) Belum terpenuhinya kebutuhan pangan	<p>1. Pengembangan dan pemberdayaan sektor pertanian yang dilaksanakan belum optimal.</p> <p>2. Kebijakan terkait kesejahteraan petani belum efektif dan efisien (terkait harga, pupuk, dll).</p> <p>3. Ketersediaan infrastruktur pertanian yang rendah.</p> <p>4. Luas tanam dan luas panen yang belum optimal.</p> <p>5. Masih kurangnya ketersediaan sarana produksi pertanian (benih, pupuk, pestisida, dan penunjang pertanian).</p>
(8) Belum optimalnya pengembangan energi baru terbarukan dalam pemenuhan energi terutama energi yang ramah lingkungan	<p>1. Pemenuhan energi masih bergantung pada energi berbasis fosil.</p> <p>2. Belum berkembangnya energi yang berbasis sumber non fosil sebagai komplementer energi berbasis fosil.</p> <p>3. Pengembangan energi alternatif pengganti BBM belum optimal.</p> <p>4. Masih rendahnya rasio elektrifikasi dan desa berlistrik di Provinsi Kalimantan Timur.</p> <p>5. Daya mampu pembangkit listrik PT PLN dan IPP masih kurang dan sebagian besar PLTD mempunyai umur teknis (<i>lifetime</i>) sudah tua.</p>

3. Belum meratanya pelayanan infrastruktur

Pengembangan infrastruktur merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan secara keseluruhan. Hal ini mengingat dampaknya yang hampir memengaruhi indikator kunci keberhasilan pembangunan dasar, baik pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi.

Pembangunan infrastruktur berkualitas dengan kapasitas yang memadai dan merata merupakan faktor penting untuk mendorong konektivitas antar wilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi. Dibutuhkan jaringan infrastruktur yang efektif guna meningkatkan keterkaitan sektor primer berbasis pertanian dengan sektor industri pendukungnya melalui kluster dan pengembangan kawasan berdasarkan potensi dan unggulan komoditas daerah. Kualitas dan kapasitas infrastruktur yang memadai akan memperlancar konektivitas, menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Belum terpenuhinya infrastruktur (jalan, jembatan, pelabuhan, air bersih, energi, dan kelistrikan) secara merata. Selain itu, sebab utama lainnya adalah kualitas infrastruktur yang belum memadai dimana terlihat minimnya kemantapan jalan provinsi sebesar 47,71 persen pada tahun 2013 (data hasil survey IRMS Dinas Pekerjaan Umum).

Dari sisi transportasi, kita lihat bersama bahwa rasio panjang jalan terhadap luas wilayah di Provinsi Kalimantan Timur adalah 52,53 Km/1000 Km². Nilai ini masih jauh di bawah rasio nasional, yakni 115 Km/1000 Km². Pada tahun 2009 masih terdapat 23 Kecamatan yang belum terhubung dengan prasarana jalan (9 diantaranya saat ini masuk dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara) dan pada tahun 2013 jumlah kecamatan yang belum terhubung dengan akses jalan sebanyak 15 Kecamatan (Khusus Provinsi Kalimantan Timur). Selain itu, akses jalan di wilayah perbatasan dan pedalaman belum berkondisi mantap, bahkan banyak jalan yang terputus oleh alur sungai maupun karena rusak parah sehingga sulit untuk dilalui.

Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan belum meratanya pelayanan infrastruktur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3
Rumusan Permasalahan: Belum Meratanya Pelayanan Infrastruktur

Masalah	Akar Masalah
(1) Rendahnya indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya penyelenggaraan jalan meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan. 2. Belum optimalnya konektivitas “jaringan transportasi” di pusat-pusat pelayanan wilayah (<i>intra-regional</i>) dan jaringan penghubung antar pusat pelayanan (<i>inter-regional</i>). 3. Daya dukung dan kapasitas prasarana untuk mobilisasi dan distribusi barang dan jasa yang tersedia belum sesuai kebutuhan. 4. Kualitas dan kuantitas infrastruktur masih rendah. 5. Sulitnya penyelesaian masalah sosial terhadap kebutuhan lahan infrastruktur.

4. Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

Sekurang-kurangnya, terdapat empat elemen penting penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi: *accountability*, *transparency*, *predictability*, dan *participation*. Tanpa empat elemen tersebut, sulit sekali untuk menjamin bahwa pembangunan daerah diselenggarakan dengan efektif dan efisien. Mencermati kinerja “tata kelola pemerintahan yang baik” di lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur yang belum terwujud, beberapa faktor penyebabnya dapat diidentifikasi antara lain: belum terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, kompeten, bersih, dan bebas KKN; pelayanan publik yang belum berkualitas; serta akuntabilitas kinerja yang belum memuaskan.

Masing-masing permasalahan ditunjukkan oleh rendahnya indeks kepuasan masyarakat, rendahnya indeks persepsi korupsi, dan predikat akuntabilitas kinerja yang masih perlu ditingkatkan. Pada tahun 2012 hasil survei menyebutkan bahwa indeks

kepuasan masyarakat hanya sebesar 6. Angka ini perlu ditingkatkan karena mengindikasikan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Indeks persepsi korupsi Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2012 masih diangka 2,8. Sementara pemerintah provinsi telah mencanangkan zona integritas kawasan bebas korupsi (ZI WBK) sebagaimana arahan dari Presiden RI. Adapun untuk predikat akuntabilitas kinerja mengalami kenaikan pada tahun 2012 menjadi B+ dari sebelumnya B dan opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.4
Rumusan Permasalahan: Belum Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik

Masalah	Akar Masalah
(1) Pemerintah yang bersih dan bebas KKN yang perlu ditingkatkan	<ol style="list-style-type: none">1. Kurang adanya transparansi dan akuntabilitas kinerja aparatur.2. Manajemen pengelolaan aset daerah belum terkelola dengan efektif, efisien, dan maksimal.3. Kurangnya perencanaan terhadap pengelolaan keuangan.4. Kesalahan fokus pemerintah adalah “menghabiskan anggaran” bukannya “mengoptimalkan anggaran”.
(2) Rendahnya kualitas pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none">1. Pengelolaan penyelenggaraan dan manajemen pemerintahan dalam mendukung pelayanan publik belum maksimal.2. Masih kurangnya kesadaran aparatur pemerintahan sebagai pelayan masyarakat.
(3) Kapasitas dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang perlu ditingkatkan	<ol style="list-style-type: none">1. Penyelenggaraan pemerintahan belum sepenuhnya menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, adil, dan mampu menyuarakan aspirasi masyarakat.2. Kedisiplinan aparatur yang masih rendah.3. Pencapaian sasaran pembangunan tingkat daerah maupun SKPD belum dikendalikan dengan baik dan bersistem.

5. Belum terciptanya kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat

Pembangunan bertujuan untuk menemukan suatu keadaan yang lebih baik, berkualitas, sejahtera, seimbang, harmonis, dan berkelanjutan. Penyelesaian isu lingkungan berkaitan dengan masalah pengkategorian limbah dan emisi serta menjalankan keterpaduan kegiatan pasca tambang dengan konservasi lingkungan harus menjadi perhatian dalam pembangunan lima tahun ke depan.

Lahan kritis di Provinsi Kalimantan Timur terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Bahkan pada tahun 2012, luas lahan kritis di Provinsi Kalimantan Timur mencapai 6.075.271 hektar dengan laju kerusakan lahan 500.000 Ha/tahun. Pertumbuhan

lahan kritis di Provinsi Kalimantan Timur disebabkan oleh penebangan hutan dan penambangan batu bara yang menjalankan kegiatan tanpa memerhatikan kaidah kelestarian lingkungan.

Belum terciptanya kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat ditandai dengan indeks kualitas lingkungan Provinsi Kalimantan Timur yang masih rendah yakni sebesar 74,07 pada tahun 2013. Hal ini dipicu juga dengan menurunnya intensitas emisi sebesar 1.584 ton/1 juta USD. Selain itu pada tahun 2012 diperkuat pula oleh tingkat pencemaran udara sebesar 360 hari/tahun dalam keadaan ISPU baik dan tingkat pencemaran sungai utama dalam tercemar berat.

Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan belum terciptanya kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.5
Rumusan Permasalahan: Belum Terciptanya Kualitas Hidup yang Baik dan Sehat

Masalah	Akar Masalah
(1) Masih rendahnya indeks kualitas lingkungan	<ol style="list-style-type: none">1. Kualitas perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang berbasis lingkungan belum maksimal.2. Penegakan hukum lingkungan yang belum efektif dan adil.3. Meluasnya sektor/subsektor lapangan usaha yang merusak lingkungan.4. Minimnya sosialisasi terhadap masyarakat terkait pentingnya lingkungan hidup.
(2) Emisi gas rumah kaca harus diturunkan	<ol style="list-style-type: none">1. Pembangunan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur belum sepenuhnya merujuk pada peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan.2. Iklim investasi belum terkondisi dan bersinergi dengan pembangunan sektor ekonomi yang rendah emisi.3. Minimnya kebijakan pemerintah tentang pembangunan daerah dengan memerhatikan lingkungan hidup khususnya emisi gas rumah kaca.4. Isu perubahan iklim belum diurusutamakan pada dokumen perencanaan pembangunan daerah

4.2 TANTANGAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pelaksanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur selama ini telah mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan di berbagai bidang. Namun, perbedaan kondisi geografis, sumber daya alam, infrastruktur, sosial budaya, dan kapasitas sumber daya manusia menyebabkan masih adanya kesenjangan dimana kesejahteraan masyarakat tidak selalu sama dan merata antara wilayah satu dengan wilayah lain. Contoh nyata permasalahan tersebut di Provinsi Kalimantan Timur yakni adanya kemajuan pembangunan di Balikpapan dan Samarinda yang relatif lebih cepat dibanding wilayah lainnya.

Sebagian masyarakat Provinsi Kalimantan Timur yang tinggal di kawasan perbatasan, perdesaan, daerah pedalaman, daerah tertinggal, dan pulau terdepan, masih menghadapi permasalahan dalam pemenuhan hak-hak dasar rakyat termasuk pangan dan gizi, layanan kesehatan dan pendidikan, pengurangan pengangguran dan kemiskinan, penyediaan air bersih dan sanitasi, sumber daya alam dan lingkungan, pembalakan hutan, kerusakan lingkungan, percepatan pembangunan jaringan prasarana dan sarana, serta perluasan akses informasi dan partisipasi dalam pembangunan.

Dengan melihat kondisi geografis dan akses infrastruktur serta sarana prasarana pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur, program peningkatan kualitas sumber daya manusia belum sepenuhnya merata. Pemerataan kualitas sumber daya manusia ini sangat diperlukan agar seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan Timur dapat meningkatkan taraf hidupnya yang secara tidak langsung akan berdampak pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Timur.

Kebijakan otonomi daerah memberikan kebebasan pada pemerintah daerah dalam mengalokasikan dana perimbangan yang merupakan dana pemerintah pusat yang diberikan untuk pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan di daerah. Berkaitan dengan hal itu, strategi alokasi belanja daerah memainkan peranan yang tidak kalah penting guna meningkatkan penerimaan daerah. Selain itu, kemampuan daerah dalam mengelola dan mengolah sumber daya yang dimiliki dapat dijadikan sebagai sumber kekayaan bagi daerah. Dalam upaya untuk meningkatkan kontribusi publik terhadap penerimaan daerah, alokasi belanja modal yang berkualitas hendaknya perlu ditingkatkan sehingga pengalokasian dana ini dapat secara optimal digunakan untuk kepentingan pembangunan daerah.

Melihat permasalahan yang saling berkaitan maka akan terbentuk suatu pola yang saling bersinergi yaitu antara pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran, kemiskinan, IPM, dan kesenjangan pendapatan daerah. Pola-pola tersebut tercantum sebagai berikut.

Pola Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran

Persebaran kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi per tahun dan rata-rata persentase pengurangan tingkat pengangguran terbuka selama tahun 2008-2013 dapat dilihat pada gambar 4.9 dengan analisis sebagai berikut.

Pertama, Kota Balikpapan, Kabupaten Berau, Kabupaten Pasir Penajam Utara dan Kota Samarinda termasuk daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan persentase pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (pro-growth, pro-job). Tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam tahun 2013-2018 adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan.

Gambar 4.6
Pola Pertumbuhan Ekonomi & Persentase Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2013



Kedua, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Paser yang terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi diatas rata-rata, tapi pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (*low growth, pro-job*). Hal ini mengindikasikan bahwa perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti pertanian dan perikanan. Tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam tahun 2013-2018 adalah meningkatkan nilai tambah dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan.

Ketiga, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Bontang terletak di kwadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-job*). Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar dan mengurangi ketergantungan pada sector pertambangan yang kurang menyerap tenaga kerja. Tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam tahun 2013-2018 adalah melakukan transformasi ekonomi secara bertahap dengan meningkatkan nilai tambah dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan.

Pola Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan

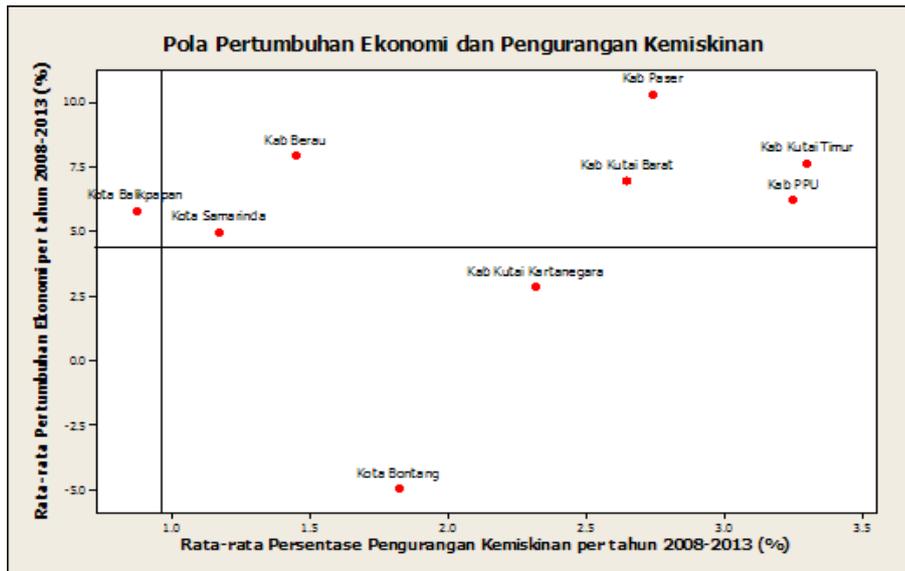
Pengurangan kemiskinan ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi yang dinikmati oleh penduduk miskin. Pola persebaran kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan rata-rata pengurangan kemiskinan selama tahun 2008-2013 adalah sebagai berikut.

Pertama, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Berau dan Kota Samarinda terletak di kuadran I, yaitu daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan rata-rata pengurangan kemiskinan di atas rata-rata provinsi. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang terjadi dapat mendorong pengurangan kemiskinan secara lebih cepat (*pro-growth, pro-poor*). Tantangan yang harus dihadapi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam tahun 2013-2018 adalah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan tetap meningkatkan upaya pengurangan kemiskinan melalui berbagai program dan kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat.

Kedua, Kota Balikpapan terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata provinsi, tapi pengurangan kemiskinan dibawah rata-rata (*low growth, pro-poor*). Tantangan yang harus diatasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam tahun 2013-2018 adalah menjaga efektivitas dan efisiensi kebijakan, program dan kegiatan pengurangan kemiskinan, dan secara bersamaan mendorong percepatan pembangunan ekonomi dengan prioritas sektor atau kegiatan ekonomi yang punya potensi berkembang seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, serta perdagangan dan jasa.

Gambar 4.7

Pola Pertumbuhan Ekonomi dan Persentase Pengurangan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2013



Ketiga, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Bontang terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata provinsi, tapi pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro poor*). Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi di daerah tersebut belum memberi dampak penurunan angka kemiskinan secara nyata. Tantangan yang harus dihadapi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam tahun 2013-2018 adalah mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti pertanian dan perkebunan, serta usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Pola Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan IPM

Pembangunan ekonomi dan peningkatan mutu sumber daya manusia harus berjalan secara seimbang. Pola persebaran kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan rata-rata kenaikan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selama tahun 2008-2013 adalah sebagai berikut.

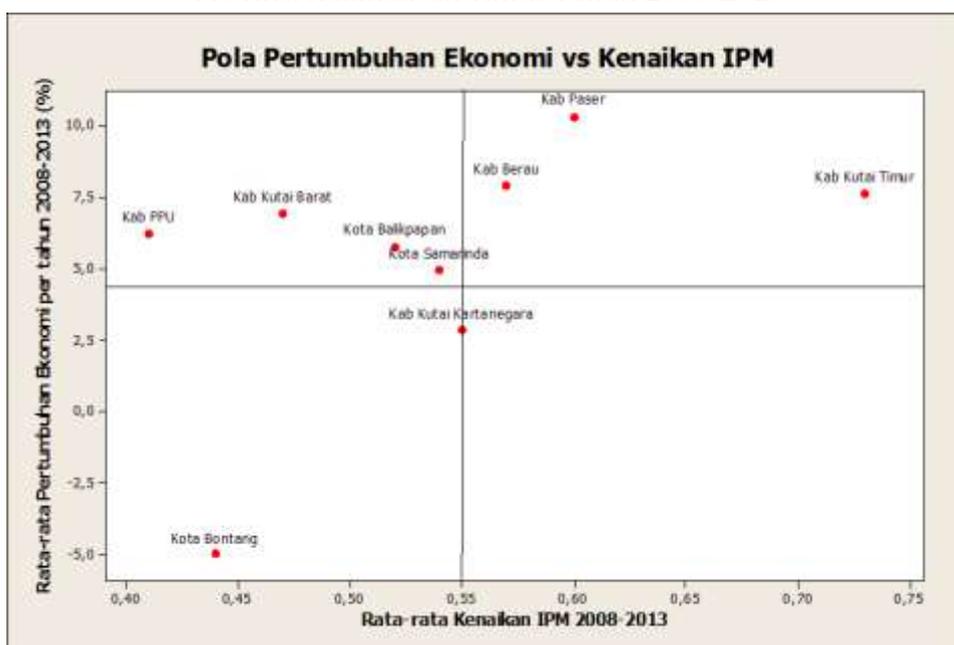
Pertama, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Paser, Kabupaten Berau terletak di kuadran I yang termasuk daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi sejalan dengan peningkatan IPM (*pro-growth, pro-human development*). Dengan kinerja yang baik ini, tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam tahun 2013-2018 adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah, dan sekaligus mempertahankan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.

Kedua, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan dan Kota Samarinda terletak di kuadran II yang termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata, tapi peningkatan IPM di bawah rata-rata (*low growth, pro-human development*). Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai kebijakan dan program pembangunan mendorong peningkatan nilai tambah, tetapi kurang meningkatkan nilai IPM. Kondisi ini juga menyiratkan bahwa kenaikan nilai IPM di kota dengan nilai IPM yang relatif tinggi semakin mengecil tanpa diimbangi dengan peningkatan standar pelayanan. Tantangan yang harus diatasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam tahun 2013-2018 adalah menjaga kinerja pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan sekaligus meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan sesuai dengan standar nasional dan internasional.

Ketiga, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Bontang terletak di kwadaran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-human development*). Kondisi ini menegaskan perlunya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota membenahi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu, Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota juga harus bekerja keras mendorong seluruh SKPD untuk memacu pembangunan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan utama daerah.

Gambar 4.8

**Pola Pertumbuhan EKonomi dan Kenaikan Indeks Pembangunan Manusia
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2013**



Pola Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Pendapatan

Pertumbuhan ekonomi yang dinikmati oleh semua penduduk akan mengurangi kesenjangan pendapatan antargolongan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang hanya dinikmati oleh sebagian penduduk akan menyebabkan melebarnya kesenjangan. Pola persebaran kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan indeks gini sebagai ukuran kesenjangan pendapatan selama tahun 2008-2013 adalah sebagai berikut.

Pertama, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Paser, Kabupaten Berau, Kota Samarinda dan Kota Balikpapan terletak di kuadran II yang termasuk daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata provinsi dengan indeks gini di bawah rata-rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak menyebabkan kesenjangan pendapatan. Dengan kinerja yang baik ini, tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam tahun 2013-2018 adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan masyarakat secara merata.

Kedua, Kabupaten Kutai Kartanegara terletak di kuadran III yang termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi distribusi pendapatan relatif merata. Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai kebijakan dan program pembangunan belum optimal dalam mendorong peningkatan produktivitas dan nilai tambah. Di sisi lain, distribusi pendapatan relatif merata. Tantangan yang harus diatasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam tahun 2013-2018 adalah mendorong kinerja pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah.

Ketiga, Kota Bontang terletak di kwadaran IV dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata provinsi dan indeks Gini di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menegaskan perlunya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kota mendorong pengembangan ekonomi dan sekaligus mendorong pemerataan pendapatan melalui pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi; serta menyediakan pelayanan publik bagi masyarakat miskin.

Gambar 4.9
Pola Pertumbuhan EKonomi dan Kenaikan Indeks Pembangunan Manusia
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2013

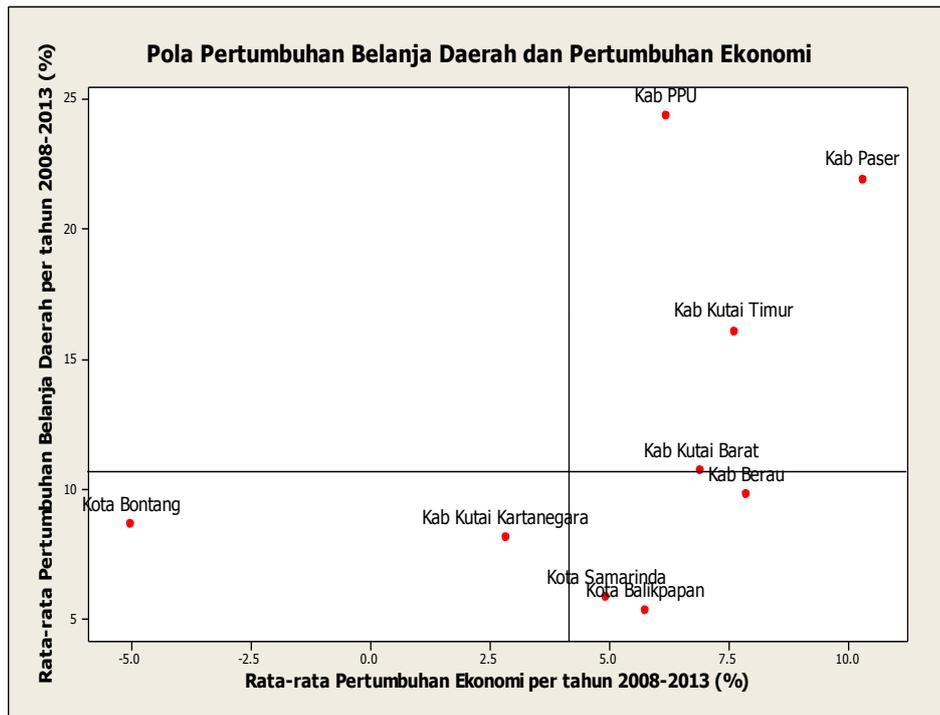


Pola Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi

Belanja daerah menjadi instrumen anggaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pelayanan publik, mempercepat pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Belanja langsung dalam bentuk belanja modal akan memberikan tambahan kapital yang sangat penting bagi peningkatan produksi, nilai tambah dan pendapatan masyarakat dan daerah. Pola persebaran kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur menurut rata-rata belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi selama tahun 2008-2013 adalah sebagai berikut.

Pertama, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Kutai Barat terletak di kuadran I, yaitu daerah dengan rata-rata pertumbuhan belanja daerah dan rata-rata pertumbuhan ekonomi relatif tinggi atau di atas rata-rata provinsi. Dengan kata lain, pertumbuhan belanja daerah yang terjadi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih cepat. Tantangan yang harus dihadapi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam tahun 2013-2018 adalah menjaga pertumbuhan belanja daerah untuk mempertahankan kinerja perekonomian daerah.

Gambar 4.10
Pola Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2013



Kedua, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Kartanegara terletak di kuadran III termasuk daerah dengan rata-rata pertumbuhan belanja dan rata-rata pertumbuhan ekonomi rendah atau di bawah rata-rata provinsi. Dengan kata lain, kenaikan belanja daerah lebih diarahkan pada peningkatan mutu sumber daya manusia. Tantangan yang harus diatasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam tahun 2013-2018 adalah meningkatkan investasi swasta dan meningkatkan belanja modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Ketiga, Kota Balikpapan, Kota Samarinda dan Kabupaten Berau terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan belanja daerah yang rendah atau di bawah rata-rata provinsi, tapi rata-rata pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah ditentukan oleh investasi swasta. Tantangan yang harus dihadapi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam tahun 2013-2018 adalah menjaga iklim investasi swasta dengan menjaga stabilitas sosial ekonomi.

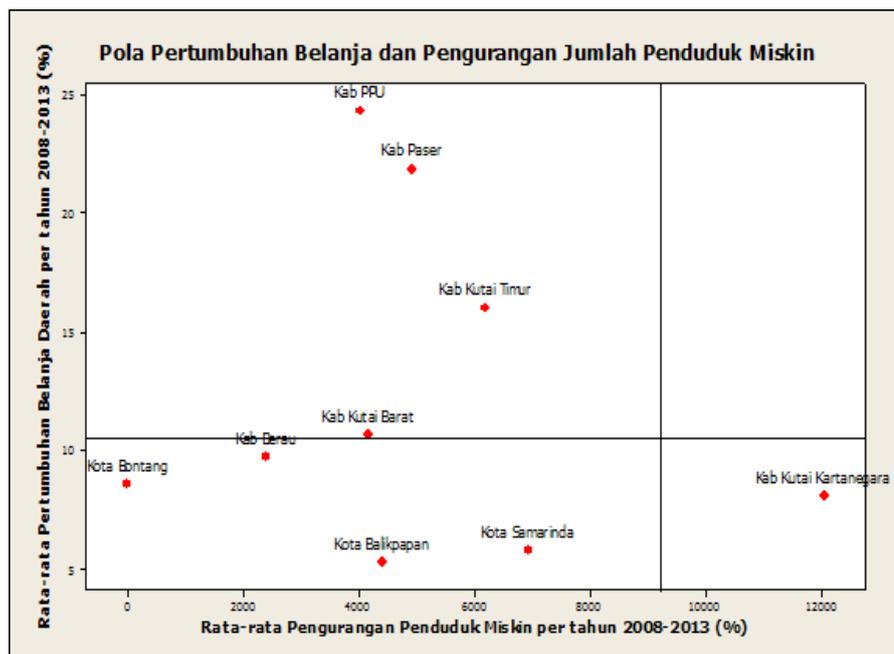
Pola Belanja Daerah dan Pengurangan Kemiskinan

Belanja daerah menjadi instrumen anggaran penting untuk mempercepat pengurangan pengangguran. Belanja daerah akan meningkatkan pelayanan publik baik pendidikan dan kesehatan; serta meningkatkan kegiatan produksi yang akan berdampak bagi masyarakat miskin. Pola persebaran kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur menurut rata-rata belanja daerah dan pengurangan kemiskinan selama tahun 2008-2013 adalah sebagai berikut.

Pertama, Kabupaten Pasir Penajam Utara, Kabupaten paser, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat termasuk daerah dengan rata-rata pertumbuhan belanja daerah yang tinggi di atas rata-rata provinsi dan rata-rata pengurangan jumlah penduduk

miskin yang relatif rendah di bawah rata-rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan belanja daerah kurang berdampak bagi pengurangan jumlah penduduk miskin. Tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam tahun 2013-2018 adalah meningkatkan belanja langsung yang tertuju pada masyarakat miskin seperti peningkatan pelayanan publik, pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK).

Gambar 4.11
Pola Belanja Daerah dan Pengurangan Kemiskinan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2013



Kedua, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kota Berau dan Kabupaten Berau terletak di kuadran III termasuk kategori daerah dengan rata-rata pertumbuhan belanja tinggi atau di atas rata-rata provinsi, tapi rata-rata pengurangan jumlah penduduk miskin rendah atau di bawah rata-rata provinsi. Dengan kata lain, kenaikan belanja daerah belum berdampak nyata bagi pengurangan kemiskinan. Kondisi ini juga dapat diartikan bahwa daerah perkotaan harus menampung arus masuk penduduk dari luar daerah yang miskin atau tidak punya keahlian dan keterampilan sehingga memperlambat upaya pengurangan kemiskinan. Tantangan yang harus diatasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam tahun 2013-2018 adalah meningkatkan belanja langsung yang berdampak kepada masyarakat miskin di perkotaan antara lain penataan dan penyediaan prasarana dan sarana permukiman, peningkatan pelayanan publik, pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK).

Ketiga, Kabupaten Kutai Kartanegara terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan belanja daerah yang rendah atau di bawah rata-rata provinsi, tapi rata-rata pengurangan jumlah penduduk miskin di atas rata-rata. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan belanja daerah diarahkan untuk mendukung penurunan angka kemiskinan

secara nyata. Tantangan yang harus dihadapi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam tahun 2013-2018 adalah menjaga kinerja kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Pola Belanja Daerah dan Pengurangan Pengangguran

Belanja daerah menjadi instrumen anggaran penting bagi pemerintah daerah untuk mendorong percepatan pengurangan pengangguran. Belanja langsung dalam bentuk berbagai program dan kegiatan akan menciptakan kesempatan kerja baru dan menjadi insentif bagi swasta untuk mengembangkan usaha dan menyerap tenaga kerja daerah. Pola persebaran kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur menurut rata-rata belanja daerah dan pengurangan jumlah pengangguran selama tahun 2008-2013 adalah sebagai berikut.

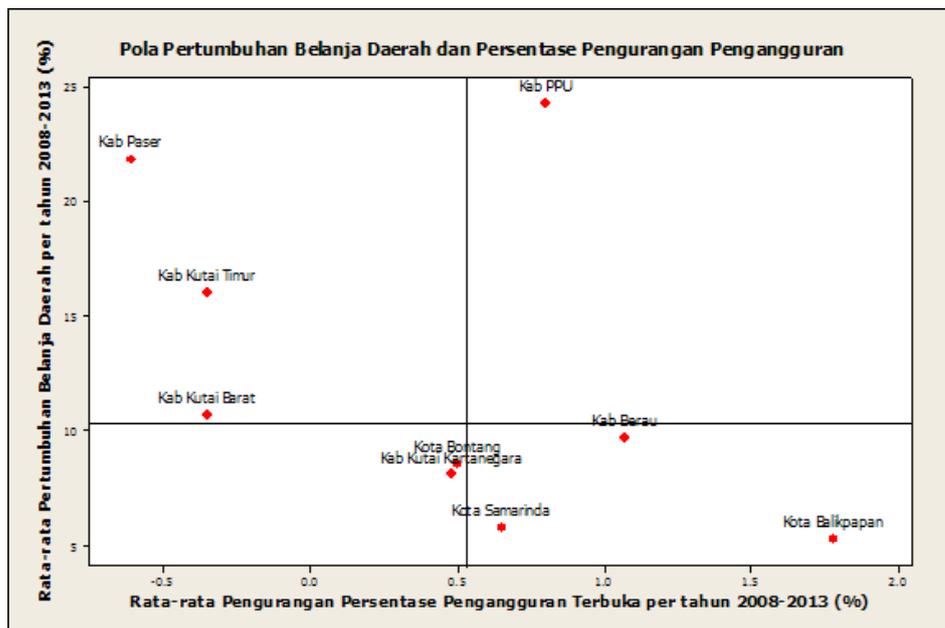
Pertama, Kabupaten Pasir Penajam Utara termasuk daerah dengan rata-rata pertumbuhan belanja daerah dan rata-rata persentase pengurangan pengangguran yang tinggi atau di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan belanja daerah dapat mendorong perluasan lapangan kerja. Tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam tahun 2013-2018 adalah menjaga efektivitas dan efisiensi belanja daerah dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan.

Kedua, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Paser yang terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan belanja daerah tinggi atau di atas rata-rata provinsi, tapi pengurangan pengangguran di bawah rata-rata provinsi. Hal ini mengindikasikan bahwa penambahan belanja daerah belum mampu mendorong penciptaan kerja baru secara nyata. Tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam tahun 2013-2018 adalah mengembangkan program dan kegiatan padat karya yang dapat menciptakan kesempatan kerja baru dan menambah upah dan pendapatan bagi masyarakat.

Ketiga, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Bontang terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan belanja daerah dan rata-rata pengurangan persentase pengangguran di bawah rata-rata provinsi. Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar dan mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan yang kurang menyerap tenaga kerja. Tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam tahun 2013-2018 adalah melaksanakan program padat karya dan sekaligus mengembangkan kegiatan ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak.

Gambar 4.12

Pola Belanja Daerah dan Pengurangan Pengangguran Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2013



Pola Belanja Daerah dan Peningkatan Nilai IPM

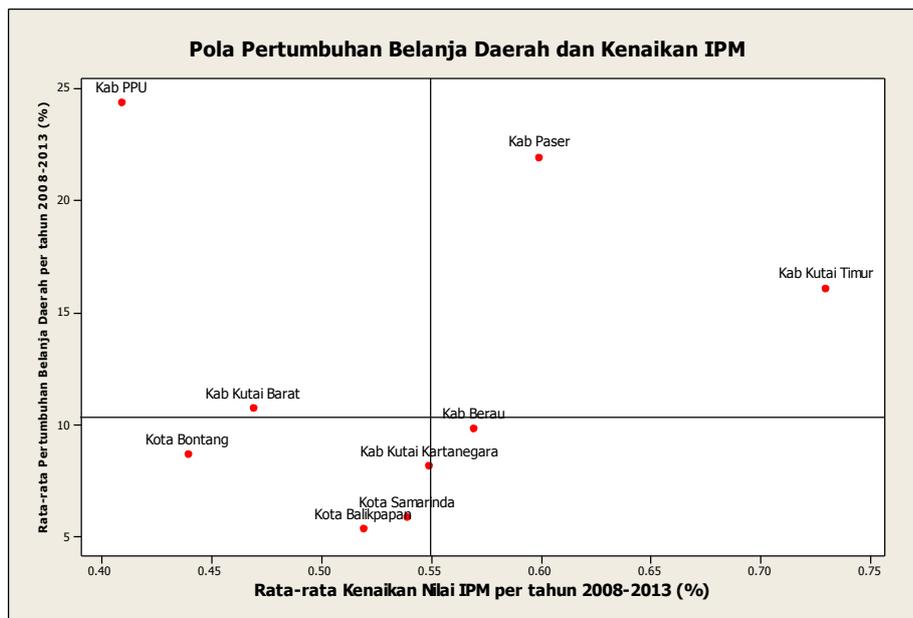
Belanja daerah menjadi instrumen anggaran untuk mendorong perbaikan pelayanan publik dan peningkatan pendapatan masyarakat; dan sekaligus meningkatkan nilai IPM. Pola persebaran kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur menurut rata-rata belanja daerah dan peningkatan nilai IPM selama tahun 2008-2013 adalah sebagai berikut.

Pertama, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Paser terletak di kuadran I yang termasuk daerah dengan rata-rata pertumbuhan belanja daerah dan rata-rata peningkatan IPM di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan belanja daerah sejalan dengan peningkatan IPM. Dengan kinerja yang baik ini, tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam tahun 2013-2018 adalah menjaga kualitas belanja daerah dengan menjaga efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan, dan sekaligus meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan masyarakat.

Kedua, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Penajam Paser Utara terletak di kuadran II yang termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan belanja daerah di atas rata-rata, tapi rata-rata peningkatan IPM di bawah rata-rata. Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai kebijakan dan program pembangunan diarahkan untuk mendorong pembangunan ekonomi, tetapi kurang meningkatkan nilai IPM. Tantangan yang harus diatasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam tahun 2013-2018 adalah mengoptimalkan belanja daerah untuk meningkatkan kinerja

pembangunan ekonomi dan sekaligus meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan sesuai dengan standar nasional dan internasional.

Gambar 4.13
Pola Belanja Daerah dan Peningkatan Nilai IPM
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2013



Ketiga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Bontang, Kota Samarinda dan Kota Balikpapan terletak di kwadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-human development*). Kondisi ini menegaskan perlunya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota membenahi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu, Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota juga harus bekerja keras mendorong seluruh SKPD untuk memacu pembangunan ekonomi dengan meningkatkan nilai tambah sektor dan kegiatan utama daerah.

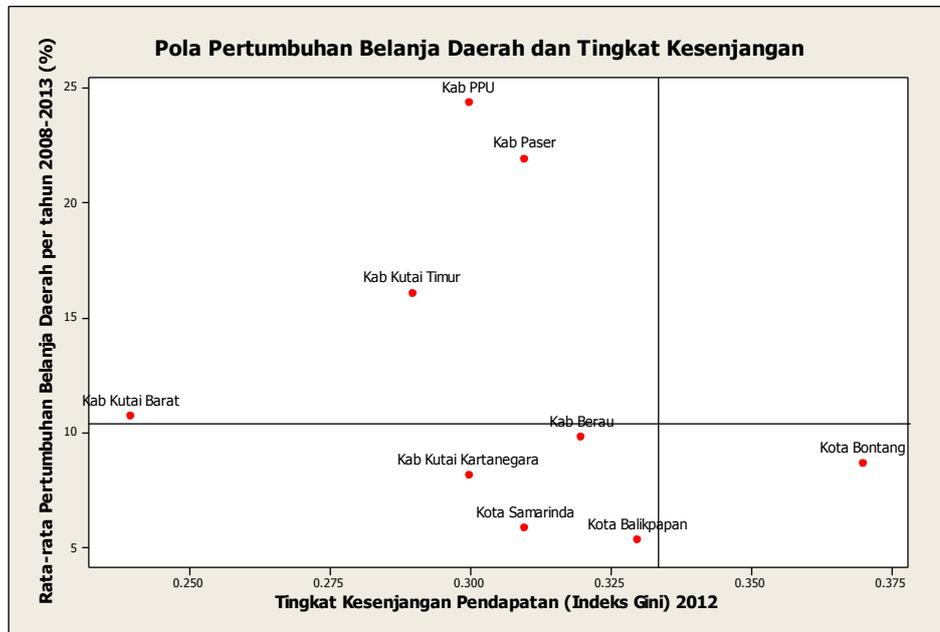
Pola Belanja Daerah dan Tingkat Kesenjangan Pendapatan

Belanja daerah menjadi instrumen anggaran untuk mendorong pemerataan pendapatan antarkelompok masyarakat. Pola persebaran kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur menurut rata-rata pertumbuhan belanja daerah dan indeks gini sebagai ukuran kesenjangan pendapatan selama tahun 2008-2013 adalah sebagai berikut.

Pertama, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser terletak di kuadran II yang termasuk daerah dengan rata-rata pertumbuhan belanja daerah diatas rata-rata provinsi dengan indeks gini di bawah rata-rata provinsi. Tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan

Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam tahun 2013-2018 adalah meningkatkan belanja daerah untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan masyarakat secara merata.

Gambar 4.14
Pola Belanja Daerah dan Tingkat Kesenjangan Pendapatan



Kedua, Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kab Kutai Kertanegara, Kab Berau terletak pada kuwdran III dengan rata rata baik pertumbuhan belanja maupun Indeks Gini dibawah rata rata provinsi.

Ketiga, Kota Bontang terletak di kwadaran IV dengan rata-rata pertumbuhan belanja daerah di bawah rata-rata provinsi dan indeks Gini di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menegaskan perlunya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kota mendorong pengelolaan belanja daerah secara lebih berkualitas dan sekaligus mendorong pemerataan pendapatan melalui pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta menyediakan pelayanan publik bagi masyarakat miskin.

4.3 ISU STRATEGIS

Pernyataan isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah karena pengaruhnya yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada lima tahun mendatang. Isu-isu strategis merupakan isu-isu yang jika diprioritaskan antisipasi dan penanganannya maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Namun jika isu-isu strategis ini tidak ditangani dengan serius, maka hal yang sebaliknya akan terjadi yakni tujuan dan sasaran menjadi sulit tercapai.

Suatu isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai isu internasional, nasional, dan regional. Berdasarkan identifikasi dari berbagai isu tersebut dapat ditentukan isu strategis yang akan ditangani dalam lima tahun kedepan.

4.3.1 ISU INTERNATIONAL

Salah satu isu strategis di tingkat internasional yang relevan bagi perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun mendatang antara lain: pencapaian tujuan pembangunan milenium (*Millenium Development Goals/MDGs*), penerapan *green economic* global (ekonomi ramah lingkungan), krisis ekonomi global yang masih mengancam perekonomian, penerapan sumber energi alternatif, antisipasi semakin menipisnya cadangan mineral dunia, antisipasi perubahan iklim global (*global warning/climate change*), serta kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang semakin pesat.

Konsep MDG's muncul dengan pemikiran bahwa ada beberapa hal yang menjadikan masyarakat menjadi tetap rentan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Oleh karena itu ditetapkan delapan tujuan beserta target-targetnya yang diharapkan mampu membantu masyarakat keluar dari persoalan-persoalan pokok atau mendasar. Konsep MDG's pada intinya bertujuan untuk membawa pembangunan ke arah yang lebih adil bagi semua pihak, baik untuk manusia dan lingkungan hidup, bagi laki-laki dan perempuan, bagi orangtua dan anak-anak, maupun bagi generasi sekarang dan generasi mendatang. Adapun *Millenium Development Goals* (MDG's) terdiri dari:

- 1) Menghilangkan angka kemiskinan absolut dan kelaparan;
- 2) Memberlakukan pendidikan dasar yang universal;
- 3) Mengembangkan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan;
- 4) Menurunkan angka kematian anak;
- 5) Memperbaiki kesehatan maternal;
- 6) Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya;
- 7) Menjamin kesinambungan lingkungan hidup;
- 8) Membangun kemitraan global untuk pembangunan.

Isu utama dalam MDG's adalah penghapusan kemiskinan dan transformasi ekonomi melalui pembangunan berkelanjutan. Sebagai isu utama MDG's, hal tersebut tidak boleh diabaikan sehingga perlu dilakukan berbagai program-program prioritas untuk mencapai target-target MDG's. Target-target MDG's akan segera berakhir pada tahun 2015 sehingga perlu perhatian khusus pada laporan panel tingkat tinggi (*High-Level Panel of Eminent Persons/HLPEP*) yang sedang merumuskan kemitraan global baru oleh tokoh-tokoh dunia yang terlibat. Terdapat lima pergeseran transformatif dalam laporan *HLPEP* seperti:

1. Mengakhiri kelaparan dan *extreme poverty*;

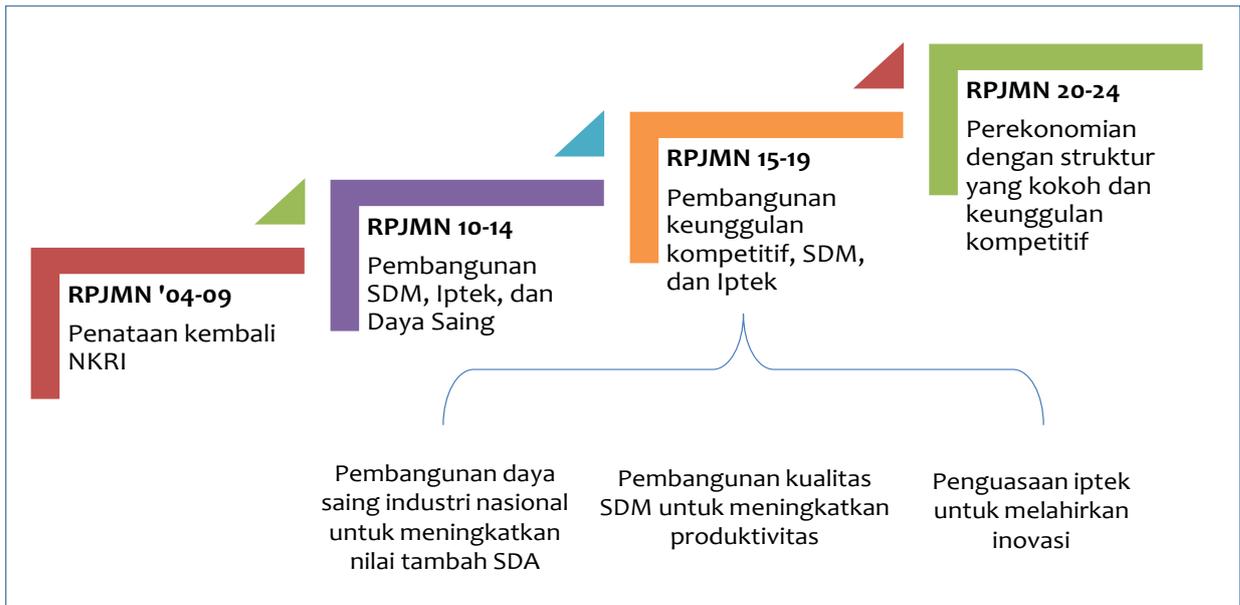
2. Melaksanakan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan yang berbasis sosial, ekonomi, dan lingkungan;
3. Menciptakan kesempatan pekerjaan dan penghidupan serta mengaitkan *growth* dengan pembangunan berkelanjutan;
4. Bebas dari konflik dan kekerasan, transparansi dan institusi publik yang efektif dan akuntabel; dan
5. Visi dan semangat baru kemitraan global. Peran spesifik bagi setiap aktor – pemerintah, akademisi, bisnis, CSO, dan lain-lain.

Dalam hal pencapaian MDG's, segenap pelaku pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur memberikan perhatian yang serius. Berbagai upaya dilakukan dalam rangka pencapaian target-target MDG's sebagai cermin pelayanan kepada masyarakat sekaligus penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur. Berbagai indikator menunjukkan keberhasilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mencapai target MDG's baik di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pemberdayaan perempuan, pengurangan kemiskinan, dan sebagainya. Walaupun demikian, perlu diketahui bahwa pencapaian tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat beberapa hal yang perlu terus ditingkatkan dan diturunkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

4.3.2 ISU ATAU KEBIJAKAN NASIONAL

Isu-isu secara nasional yang memiliki potensi besar untuk memengaruhi arah pembangunan Provinsi Kalimantan Timur pada masa mendatang adalah kebijakan dari pemerintah pusat. Dokumen perencanaan tingkat nasional merupakan salah satu sumber kebijakan yang memiliki kepastian tinggi dan dalam amanat peraturan perundangan harus diikuti karena penyusunan RPJMD harus berpedoman pada RPJMN. Mengingat perodesasi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur melebihi batas RPJMN II yang saat ini masih berlaku, maka arah kebijakan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur menyelaraskan dengan periode RPJMN III (2015-2019) yang mengacu pada RPJPN tahap ketiga (2015-2019).

Gambar 4.15
Fokus Kebijakan Setiap Tahapan dalam RPJPN 2005-2025



Arah kebijakan untuk RPJMN tahap III ditekankan pada pembangunan daya saing industri nasional untuk meningkatkan nilai tambah SDA, pembangunan kualitas SDM untuk meningkatkan produktivitas, dan penguasaan iptek untuk melahirkan inovasi. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJPN, arah kebijakan untuk periode RPJMN III (2015-2019) yang relevan untuk pengembangan daerah dijelaskan sebagai berikut:

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM tahap III, RPJM tahap III ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Kualitas sumber daya manusia terus mengalami perubahan positif yang ditandai oleh meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya tumbuh kembang optimal serta kesejahteraan dan perlindungan anak; tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang; serta mantapnya budaya dan karakter bangsa.

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan semakin efektif dan efisien yang dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari; terus membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup; meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat terhadap lingkungan hidup; serta semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di seluruh wilayah Indonesia.

Daya saing perekonomian Indonesia semakin kuat dan kompetitif dengan semakin terpadunya industri manufaktur dengan pertanian, kelautan, dan sumber daya alam

lainnya secara berkelanjutan; terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha; makin selarasnya pembangunan pendidikan, industri, ilmu pengetahuan dan teknologi; serta terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan, dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian.

Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi; terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat tercapai; mulai dimanfaatkan tenaga nuklir untuk pembangkit listrik dengan mempertimbangkan faktor keselamatan secara ketat; terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern guna terciptanya masyarakat informasi Indonesia; terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air dan pengembangan sumber daya air; serta terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Wilayah perdesaan merupakan titik vital pembangunan masyarakat ekonomi lemah. Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur perdesaan harus terus dikembangkan terutama untuk mendukung pembangunan pertanian. Selain itu, pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi sarana prasarana pendukung kehidupan bagi seluruh masyarakat harus terus ditingkatkan dengan didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang, berkelanjutan, efisien, dan akuntabel. Diharapkan, dengan terpenuhinya kondisi tersebut semakin mendorong terwujudnya kabupaten/kota tanpa permukiman kumuh.

Berdasarkan telaahan RPJPN tahap III (2015-2019), maka pembangunan Provinsi Kalimantan Timur harus selaras dengan arahan RPJPN tahap III dengan menyesuaikan karakteristik lokal seperti:

- a. Meningkatkan daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat;
- b. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang semakin mantap dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari;
- c. Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan didukung oleh meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat; serta
- d. Semakin terpadunya industri manufaktur dengan pertanian, kelautan, dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan untuk mendukung daya saing perekonomian Indonesia yang semakin kuat dan kompetitif.

Sesuai dengan rancangan teknokratik yang disampaikan oleh Menteri Pembangunan Nasional pada Musrenbang RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tanggal 18-19

Maret 2014 diperoleh penjelasan tentang arah kebijakan RPJMN 2015-2019 sebagai berikut.

- A. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan
 - 1. Meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas untuk semua jenjang pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada daerah 3T, penduduk miskin, dan anak dengan kebutuhan khusus;
 - 2. Meningkatkan kompetensi siswa Indonesia dalam bidang matematika, sains, dan literasi;
 - 3. Menyelaraskan bidang studi SMK dengan kegiatan ekonomi utama di masing-masing kab/kota;
 - 4. Memperkuat peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan menengah yang berkualitas;
 - 5. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama bagi ibu dan anak;
 - 6. Memperbaiki status gizi remaja putri, ibu hamil dan anak dibawah 2 tahun;
 - 7. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit serta penyehatan lingkungan;
 - 8. Meningkatkan kualitas implementasi jaminan kesehatan masyarakat; dan
 - 9. Pengembangan kebijakan afirmatif: pelayanan dasar, pengembangan penghidupan berkelanjutan, dan sistem perlindungan sosial yang komprehensif.
- B. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
 - 1. Transformasi ekonomi melalui industrialisasi berkelanjutan (green secara bertahap) dan penguasaan iptek;
 - 2. Menjaga dan mempertahankan kesinambungan fiskal;
 - 3. Meningkatkan daya saing produk ekspor non migas manufaktur dan jasa (parawisata dan lainnya);
 - 4. Meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan kesempatan kerja yang berkualitas; dan
 - 5. Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi;
- C. Penyiapan landasan pembangunan yang kokoh
 - 1. Memantapkan kualitas reformasi birokrasi untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - 2. Meningkatkan penegakan hukum serta efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi;
 - 3. Memantapkan dan mempercepat konsolidasi demokrasi;
 - 4. Meningkatkan kapasitas pertahanan dan stabilitas keamanan nasional; dan
 - 5. Meningkatkan kepemimpinan dan kualitas partisipasi Indonesia dalam forum internasional.

- D. Mengembangkan dan pemeratakan pembangunan daerah
 - 1. Menjaga momentum pertumbuhan Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera serta meningkatkan kinerja pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua;
 - 2. Menjamin pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah bagi seluruh lapisan masyarakat;
 - 3. Mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan;
 - 4. Meningkatkan kualitas pembangunan perkotaan dan perdesaan;
 - 5. Mempercepat penetapan rencana tata ruang wilayah; dan
 - 6. Mengoptimalkan desentralisasi dan otonomi daerah.
- E. Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan
 - 1. Memperkuat konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan;
 - 2. Mempercepat penyediaan infrastruktur dasar (perumahan, air bersih, sanitasi, dan listrik);
 - 3. Menjamin ketahanan air, pangan, dan energi untuk mendukung ketahanan nasional;
 - 4. Mengembangkan sistem transportasi massal perkotaan;
 - 5. Meningkatkan kontribusi kerjasama pemerintah swasta dalam pembangunan infrastruktur; dan
 - 6. Mengintegrasikan isu lintas bidang infrastruktur.
- F. Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam yang berkelanjutan
 - 1. Meningkatkan kapasitas produksi melalui peningkatan produktivitas dan perluasan areal pertanian;
 - 2. Meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditi pertanian/perikanan;
 - 3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral dan tambang lainnya;
 - 4. Meningkatkan produksi dan diversifikasi sumber daya energy;
 - 5. Meningkatkan efisiensi dan pemerataan pemanfaatan energy;
 - 6. Mengembangkan ekonomi kelautan yang terintegrasi antarsektor dan antarwilayah; dan
 - 7. Pengelolaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati.

4.3.3 ISU ATAU KEBIJAKAN PROVINSI

Telaahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur bertujuan untuk menyelaraskan dan menjabarkan rencana jangka panjang dalam rencana jangka menengah. Melalui telaahan terhadap RPJPD Provinsi Kalimantan Timur, maka akan diketahui sasaran dan arah kebijakan jangka panjang untuk

menjaga konsistensi perencanaan antar dokumen sehingga dapat terwujud arahan pada pembangunan jangka menengah.

Berdasarkan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Timur nomor 15 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025, visi Provinsi Kalimantan Timur yaitu **“Terwujudnya Masyarakat yang Adil dan Sejahtera dalam Pembangunan yang Berkelanjutan”**. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025, sebagai berikut:

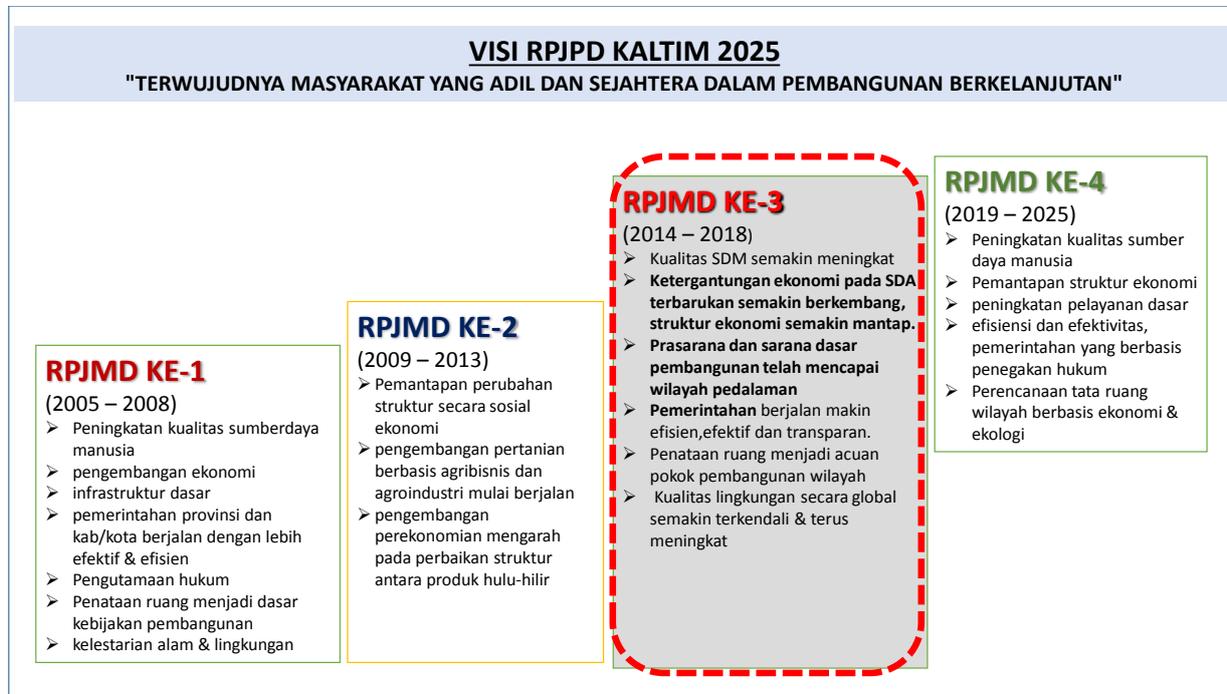
1. Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia;
2. Mewujudkan struktur ekonomi yang handal dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya;
3. Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional;
4. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum; dan
5. Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.

Dalam perencanaan tersebut, secara cermat telah ditetapkan tujuan dan target-target/sasaran pembangunan di setiap bidang/sector pembangunan. Merujuk kepada RPJPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2005-2025, sasaran pokok yang telah ditetapkan dalam kerangka pembangunan jangka panjang dibedah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia;
2. Terwujudnya struktur ekonomi yang handal dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya;
3. Terwujudnya pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional;
4. Terwujudnya efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum; dan
5. Terwujudnya pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.

Untuk mencapai sasaran RPJPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2005-2025, maka dalam dokumen perencanaan harus disusun arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur. Inti arah kebijakan RPJMD periode ketiga sebagaimana terlihat pada gambar berikut.

Gambar 4.16
Tahapan Arah Kebijakan RPJMD Ketiga



Sebagaimana tampak pada gambar diatas, arah kebijakan Provinsi Kalimantan Timur pada RPJMD periode ketiga, meliputi:

- a. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
- b. Pemerataan Pembangunan
- c. Peningkatan Kualitas SDM
- d. *Renewable Resources Transformation*
- e. Pemerataan Infrastruktur Dasar
- f. Konsistensi Penataan Ruang
- g. Peningkatan Kualitas Lingkungan

Selain berdasarkan dokumen RPJPD terutama pada tahap ke III, isu atau kebijakan provinsi dalam penyusunan RPJMD juga memerhatikan buku putih yang berisi buku panduan penyusunan visi dan misi para calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hal ini harus menjadi perhatian khusus karena penjelasan visi dan misi yang disampaikan oleh Kepala Daerah terpilih harus menjadi pondasi awal penyusunan sasaran dan tujuan RPJMD. Selanjutnya, setelah mengakomodir berbagai poin penting dalam penyusunannya, RPJMD harus dapat dioperasionalkan dan diselaraskan dengan sasaran pokok di dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan komitmen gubernur dan wakil gubernur terpilih serta hasil analisis permasalahan dan isu strategis Provinsi Kalimantan Timur yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima tahun ke depan serta keselarasan dengan sasaran pokok

pembangunan jangka panjang dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025, maka untuk memajukan Provinsi Kalimantan Timur kedepan ditetapkan visi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur periode 2013-2018 adalah sebagai berikut:

**“MEWUJUDKAN KALTIM SEJAHTERA YANG MERATA DAN BERKEADILAN
BERBASIS AGROINDUSTRI DAN ENERGI RAMAH LINGKUNGAN”**

Kondisi yang ingin dicapai melalui pokok-pokok visi diatas adalah adanya keseimbangan antara kesejahteraan sosial dan ekonomi, keharmonisan antara pembangunan ekonomi, sosial, serta aspek lingkungan hidup yang kesemuanya diketahui saling memengaruhi. Elemen Visi *Kaltim Sejahtera Yang Merata dan Berkeadilan* pada intinya adalah pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat ini maupun masa datang melalui pemerataan pembangunan ekonomi yang bertumpu pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Misi merupakan upaya umum bagaimana mewujudkan Visi. Selain itu, Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus ada dan bagaimana komitmen terus dijaga kepada segenap *stakeholders* pembangunan. Berdasarkan visi di atas maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah sebagai berikut:

1. **Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kaltim yang mandiri dan berdaya saing tinggi;**
2. **Mewujudkan daya saing ekonomi yang berkerakyatan berbasis SDA dan energi terbarukan;**
3. **Mewujudkan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat secara merata;**
4. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik; dan**
5. **Mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berprespektif perubahan iklim.**

4.3.4 HASIL TELAHAH RPJMD PROVINSI SEKITAR

Berdasarkan letak geografisnya, Provinsi Kalimantan Timur berdampingan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara. Namun dikarenakan Kalimantan Utara baru berdiri dan belum mempunyai dokumen perencanaan, maka analisis ini belum memasukkan Provinsi Kalimantan Utara.

Kelima provinsi tersebut di atas berada pada satu pulau Kalimantan yang berarti memiliki wilayah ekologis (*ecologion region*) yang sama sehingga karakteristik etnis terkait kesejahteraan sosial-ekonomi relatif sama. Dengan spesifikasi kartografis dan pautan ekologis serta historis yang sama, maka upaya untuk menelaah rencana pembangunan di masing-masing provinsi merupakan hal yang mutlak dilakukan guna menyelaraskan pembangunan daerah. Penyandingan dokumen yang untuk menyusun analisis antar wilayah bukanlah hal yang mudah karena masing-masing wilayah mempunyai perbedaan

latar belakang politik dan kebutuhan. Perbedaan periode penyusunan juga perlu diperhatikan karena dokumen-dokumen tersebut dirangkai berdasarkan isu-isu strategis yang berbeda pada tahun-tahun tertentu.

Dokumen RPJMD tiga provinsi (Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah) mempunyai visi yang sama-sama kuat dan mempunyai tujuan yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka pencapaian visi tersebut, mereka mempunyai misi yang sebagian lingkup besarnya adalah pembangunan sumber daya manusia, pembangunan sarana dan prasarana, pembangunan infrastruktur secara keseluruhan, dan pemerataan pembangunan hingga wilayah pelosok pedalaman.

Dalam perencanaan pembangunan, masing-masing daerah memiliki agenda pembangunan meskipun tidak semua wilayah mencantumkan agenda tersebut. Agenda ini penting karena sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan agar pembangunan daerah dapat berjalan dengan maksimal. Pada dokumen RPJMD ketiga Provinsi ini mempunyai tujuan/sasaran melingkupi cakupan permasalahan daerah masing-masing dengan poin penting berupa tujuan dan sasaran yang mengacu pada misi RPJMD masing-masing daerah.

Perencanaan pembangunan harus mempunyai strategi khusus agar tercapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara efektif dan efisien. Strategi pembangunan yang dimiliki oleh tiga provinsi tetangga Provinsi Kalimantan Timur mempunyai spesifikasi yang cukup jelas meskipun pada Provinsi Kalimantan Selatan belum terurai dengan maksimal.

Tabel 4.6
Penyandingan Substansi Utama RPJMD
Provinsi Kalimantan Selatan (2011-2015), Kalimantan Barat (2008-2013), dan Kalimantan Tengah (2010-2015)

Elemen	Kalimantan Selatan	Kalimantan Barat	Kalimantan Tengah
Periode	2011 - 2015	2008 – 2013	2010 - 2015
Visi	Terwujudnya Kalimantan Selatan yang Berkembang, Maju, Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Damai (Bermunajad)	Mewujudkan Masyarakat Kalimantan Barat Yang beriman, sehat, Cerdas, Aman Berbudaya dan Sejahtera	Meneruskan dan Menuntaskan Pembangunan Kalimantan Tengah agar Rakyat Lebih Sejahtera dan Bermartabat Demi Kejayaan NKRI”
Misi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas hidup beragama, sosial dan budaya; 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing; 3. Mengembangkan daya saing ekonomi daerah berbasis lingkungan dan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan posisi geografis; 4. Meningkatkan ketersediaan kuantitas dan kualitas serta aksesibilitas infrastruktur wilayah; 5. Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang baik dan bersih. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan peningkatan sistem pelayanan dasar dalam bidang sosial, kesehatan, pendidikan, agama, keamanan, dan ketertiban melalui systemkelembagaan manajemen yang efisien dan transparan. 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas tenaga kependidikan dan penyediaan prasarana dan sarana pendidikan serta pemerataan pendidikan. 3. Meningkatkan kemampuan kapasitas dan akuntabilitas aparatur pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan publik, serta menempatkan aparatur yang profesional dan berakhlak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki serta sesuai dengan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sinergi dan harmonisasi pembangunan kewilayahan Kalimantan Tengah melalui pemantapan Rencana Penataan Ruang Provinsi (RTRWP) secara berkelanjutan dengan memerhatikan kesejahteraan rakyat dan lingkungan hidup. 2. Menciptakan pendidikan berkualitas dan terakses secara merata. 3. Menjamin dan meningkatkan kesehatan masyarakat yang merata dan mudah dijangkau. 4. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur yang menjangkau kantong-kantong pemukiman penduduk dan memfasilitasi pembangunan ekonomi rakyat. 5. Pengembangan dan penguatan ekonomi kerakyatan yang saling

Elemen	Kalimantan Selatan	Kalimantan Barat	Kalimantan Tengah
		<p>peraturan jenjang karir kepegawaian yang berlaku.</p> <p>4. Menegakkan supremasi hukum, meningkatkan keadilan sosial, dan perlindungan hak asasi manusia guna mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang rukun, aman, dan damai.</p> <p>5. Melaksanakan peningkatan pembangunan infrastruktur dasar guna memperlancar mobilitas penduduk dan arus barang serta mempercepat pembangunan dan pengembangan pariwisata di wilayah pedalaman, perbatasan, pesisir dan kepulauan sebagai sumber potensi ekonomi.</p> <p>6. Melaksanakan pengendalian dan pemanfaatan tata ruang dan tata guna wilayah sesuai dengan peruntukan dan regulasi, guna menghindari kesenjangan wilayah dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.</p> <p>7. Melaksanakan pemerataan dan keseimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan tetap memerhatikan aspek ekologi dalam pemanfaatan sumberdaya</p>	<p>bersinergi dan berkelanjutan.</p> <p>6. Pelembagaan sistem penguatan kapasitas SDM masyarakat dan pemerintah.</p> <p>7. Terciptanya kerukunandan kedamaian serta sinergitas dan harmonisasi kehidupan bermasyarakat di Kalimantan Tengah.</p>

Elemen	Kalimantan Selatan	Kalimantan Barat	Kalimantan Tengah
		<p>alam.</p> <p>8. Menggali dan mengembangkan nilai-nilai dan keragaman budaya serta memanfaatkan keindahan alam untuk kepentingan kepariwisataan.</p> <p>9. Mengembangkan sumber daya lokal bagi pengembangan ekonomi masyarakat melalui sistem pengelolaan yang profesional, efektif, dan efisien serta, akuntabel, dengan didukung sistem dan sarana investasi yang baik melalui penyediaan data potensi investasi guna menarik dan mendorong masuknya investasi.</p> <p>10. Mengembangkan jaringan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak swasta baik dalam tataran lokal, regional, nasional, maupun internasional, penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur serta SDM yang memadai.</p> <p>11. Memperluas lapangan kerja dan usaha dengan berbasis ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan potensi dan kekuatan ekonomi lokal terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi, dengan membuka akses ke sumber modal, teknologi dan pasar untuk</p>	

Elemen	Kalimantan Selatan	Kalimantan Barat	Kalimantan Tengah
		<p>meningkatkan daya saing, serta menggali, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya, kekayaan budaya daerah dan tradisional guna mempertahankan ketahanan budaya sekaligus mewujudkan pariwisata berbasis budaya dan kerakyatan.</p>	
<p>Prioritas Pembangunan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun kehidupan sosial dan budaya; 2. Membangun sumber daya manusia; 3. Peningkatan perekonomian; 4. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur; 5. Pengelolaan lingkungan hidup; 6. Melaksanakan pemerintahan yang baik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat; 2. Meningkatkan kecerdasan SDM; 3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; 4. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur, manajemen pemerintahan, dan pelayanan publik; 5. Peningkatan pembangunan infrastruktur dasar; 6. Peningkatan kemampuan pembiayaan pembangunan; dan 7. Meningkatkan pemerataan pembangunan, keadilan, aman, damai serta ketahanan budaya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan pusat – pusat ekonomi unggulan daerah (lanjutan); 2. Pengembangan sarana dan prasarana bagi tenaga pendidik dan kependidikan(lanjutan); 3. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan(lanjutan) ; 4. Penyelenggaraan sistem pendidikan dan kesehatan(lanjutan); 5. Penyediaan sarana-prasarana dan infrastruktur pendidikan dan kesehatan(lanjutan); 6. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan(lanjutan); 7. Pengembangan infrastruktur dan jaringan transportasi, komunikasi, informatika, pengairan dan kelistrikan(lanjutan); 8. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan

Elemen	Kalimantan Selatan	Kalimantan Barat	Kalimantan Tengah
			masyarakat(lanjutan); 9. Peningkatan inovasi dan produktivitas ekonomi kerakyatan; 10. Pengembangan kapasitas dan kinerja aparatur; 11. Pengembangan budaya lokal; 12. Pengembangan daya saing dan orientasi ekspor komoditas lokal; dan 13. Pengembangan kultur masyarakat yang rukun, damai, dan sejahtera.
Tujuan/Sasaran Pembangunan	1. Mewujudkan daerah yang memiliki kualitas kehidupan beragama, sosial serta berbudaya yang berakar pada nilai-nilai luhur; 2. Mewujudkan daerah yang memiliki masyarakat yang berpendidikan berkualitas, dan berkompentensi kerja dan berdaya saing; 3. Mewujudkan daerah berdaya saing dengan basis perekonomian masyarakat dan kelestarian lingkungan, memanfaatkan sumber daya lokal dan posisi geografis Kalimantan Selatan; 4. Mewujudkan persiapan pengembangan daerah industri dan perdagangan berbasis agroindustri;	1. Meningkatkan SDM yang beriman, cerdas dan berbudaya; 2. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola lapangan pekerjaan serta meningkatkan produktivitas usaha yang efisien dan efektif; 3. Meningkatkan kemampuan aparatur dan memberikan pelayanan publik; 4. Meningkatnya pembangunan wilayah pedalaman, perbatasan, pesisir dan kepulauan termasuk meningkatnya pembangunan kawasan perbatasan dan perkotaan; 5. Terciptanya kehidupan masyarakat yang rukun aman dan damai; 6. Meningkatnya derajat kesejahteraan masyarakat dengan pendapatan	1. Revitalisasi dan terciptanya <i>cluster-cluster</i> ekonomi unggulan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota; 2. Terselenggaranya penataan ruang yang memerhatikan keberlanjutan sumber daya wilayah; 3. Terselenggaranya sistem pendidikan yang bermutu dan terjangkau; 4. Tersedianya infrastruktur pendidikan hingga ke pelosok wilayah; 5. Meningkatnya sistem layanan kesehatan dasar yang bermutu dan terjangkau; 6. Tersedianya akses infrastruktur kesehatan dasar hingga ke pelosok wilayah; 7. Terwujudnya sistem dan jaringan transportasi, komunikasi, dan informatika yang mendukung aktivitas

Elemen	Kalimantan Selatan	Kalimantan Barat	Kalimantan Tengah
	<p>5. Mewujudkan ketersediaan infrastruktur daerah yang merata dan berkualitas serta mampu mendukung pengembangan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya;</p> <p>6. Mewujudkan daerah yang memiliki tata pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab, berjiwa melayani dan mengayomi masyarakat.</p>	<p>perkapita di atas rata-rata kebutuhan hidup minimum; dan</p> <p>7. Meningkatnya kemampuan pembiayaan pembangunan dengan mendorong masuknya investor dalam dan luar negeri.</p>	<p>ekonomi kerakyatan;</p> <p>8. Tersedianya infrastruktur pengairan yang mendukung ketahanan pangan;</p> <p>9. Tersedianya pemanfaatan sumber energi untuk masyarakat;</p> <p>10. Terselenggaranya sistem perekonomian kerakyatan yang terpadu;</p> <p>11. Terselenggaranya kemitraan usaha antara ekonomi kerakyatan dengan ekonomi skala besar;</p> <p>12. Meningkatnya daya saing masyarakat;</p> <p>13. Meningkatnya kapasitas dan kinerja aparatur pemerintah; dan</p> <p>14. Terwujudnya solidaritas antar kelompok masyarakat.</p>

Sebagai tambahan analisis, berdasarkan Perjanjian Kerjasama tentang Forum Kerjasama Revitalisasi dan Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK) Nomor:119/4320/BPPWK.A/2013, Nomor:050/289/SET-I/BAPPEDA/2013, Nomor:9/PK-BAPPEDA/2013, dan Nomor: 050/945/VII/BAPP, untuk merumuskan langkah-langkah strategis bagi terwujudnya percepatan pembangunan regional kalimantan dengan tujuan:

- a. Merumuskan isu strategis dalam rangka percepatan pembangunan regional kalimantan;
- b. Menyusun program/kegiatan dengan skala prioritas; dan
- c. Meningkatkan daya saing daerah dan memacu pertumbuhan ekonomi regional Kalimantan.

Objek perjanjian kerjasama kewilayahan se-Kalimantan ini meliputi aspek pelayanan umum, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, dan pengelolaan lingkungan hidup dengan rincian sebagai berikut.

- a. Pembangunan infrastruktur: jalan dan jembatan, pelabuhan, bandar udara, rel kereta api, pengelolaan sumber daya air.
- b. Pembangunan sarana ketenagalistrikan dan pemenuhan energi.
- c. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- d. Pembangunan sumber daya manusia.
- e. Pengembangan sosial budaya.
- f. Pengelolaan lingkungan hidup.
- g. Pembangunan kawasan perbatasan.

Sedangkan tema dan fokus objek perjanjian kerjasama kewilayahan se-Kalimantan setiap tahun akan ditetapkan dan disesuaikan dengan isu strategis dan analisis kebutuhan daerah dan dituangkan dalam RKPD masing-masing provinsi tiap tahun.

4.3.4 ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil telaahan terhadap isu internasional, isu dan kebijakan nasional, serta isu dan kebijakan Provinsi Kalimantan Timur, maka isu dan kebijakan serta permasalahan pembangunan yang ada selama beberapa tahun terakhir perlu dikaji kembali untuk penetapan isu strategis Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

1. Pemekaran Kalimantan Utara

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab II, melalui rapat paripurna DPR pada tanggal 25 Oktober 2012, wilayah Provinsi Kalimantan Timur mengalami pemekaran menjadi 2 Provinsi dimana 5 kabupaten di wilayah utara menjadi Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. Tujuan utama pemekaran Provinsi Kalimantan Utara, disamping adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat di wilayah

perbatasan dan pulau-pulau terluar, adalah dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik untuk dapat memperpendek rentang kendali (*span of control*) pemerintahan, sehingga lebih efisien dan efektif sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik; yang pada akhirnya diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah, dan memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di wilayah perbatasan dengan negara lain/tetangga.

Secara historis maupun kepentingan strategis yang lebih luas, Provinsi Kalimantan Timur tetap memiliki tanggungjawab yang besar agar pemekaran Provinsi Kalimantan Utara mencapai apa yang menjadi tujuannya. Dukungan dari segi politik, teknokratik, dan pendanaan dapat mempercepat peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta dapat memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk menyelenggarakan otonomi di Kalimantan Utara. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tetap berkoordinasi dengan baik agar selama fase persiapan pembentukan pemerintahan yang baru beserta perangkat daerah dan sarana prasarana yang dibutuhkan dapat terkondisi dengan baik. Sesuai amanat peraturan perundangan yang berlaku, Gubernur Provinsi Kalimantan Timur harus berkoordinasi dengan baik bersama Pejabat Gubernur Kalimantan Utara dalam mengatur dan melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, serta dokumen kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.

2. Perubahan Iklim Akibat Emisi Gas Rumah Kaca

Provinsi Kalimantan Timur sebagai daerah yang beriklim tropis dengan habitat yang sangat luas dan memiliki hutan lindung seluas 1.698.171 ha memiliki peranan penting dalam mengantisipasi perubahan iklim dan berada di garis terdepan dalam upaya-upaya internasional untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Secara global disadari bahwa penanganan perubahan iklim merupakan bagian tak terpisahkan dari tantangan pembangunan nasional dan daerah. Perencanaan atas berbagai aspek perubahan iklim seharusnya dijalankan bersamaan dengan perencanaan pembangunan ekonomi nasional dan daerah, sehingga perencanaan untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim harus terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah (kabupaten/kota).

Provinsi Kalimantan Timur secara nyata memberikan kontribusi penurunan emisi gas rumah kaca melalui Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2012 Tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yaitu penurunan emisi Gas Rumah Kaca skala nasional sebesar 26 persen dengan usaha sendiri dan akan meningkat hingga 41 persen dengan bantuan luar negeri hingga tahun 2020 dalam bentuk kebijakan, strategi, dan program serta kegiatan dengan penetapan tahapan-tahapan pencapaian dalam kurun waktu per lima tahun.

3. **Mainstreaming Ekonomi Hijau Dalam Perencanaan Pembangunan**

Berawal dari komitmen terhadap arus pemikiran agar pembangunan harus menemukan titik tengah antara berbagai kekuatan dan kepentingan yang kerap saling bertolak belakang maka deklarasi *Kaltim Green* dapat dianggap sebagai salah satu cikal bakal transformasi (pergerakan) perekonomian berbasis lingkungan. *Kaltim Green* didefinisikan sebagai kondisi Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki perangkat kebijakan, tata kelola pemerintahan serta program-program pembangunan yang memberikan perlindungan sosial dan ekologis terhadap masyarakat Provinsi Kalimantan Timur, memberikan jaminan jangka panjang terhadap keselamatan dan kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan hidup. Kaltim Hijau menandai dimulainya sebuah proses pelaksanaan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan (*Green Development*) dengan basis tata kelola pemerintahan yang berwawasan lingkungan (*Green Governance*).

Sebagai tindak lanjut deklarasi *Kaltim Green* pada Januari 2011 dan untuk mengkonkritkan program dan kegiatan pembangunan yang berazaskan ekonomi hijau, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah membentuk Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) di tingkat Provinsi. DDPI ini mewadahi, mengkoordinasikan, dan mendukung semua hal yang berhubungan dengan inisiatif perubahan iklim. Semua kelompok kerja yang berkaitan dengan REDD digabung sebagai subkomite dan sektor swasta. Selain itu, LSM juga berpartisipasi aktif melalui dewan penasehat teknis. Sedangkan para bupati/walikota mendampingi steering committee dan memberi laporan secara langsung kepada Gubernur.

Dalam konteks Internasional, Provinsi Kalimantan Timur telah berinisiatif menjadi anggota dan terlibat secara aktif dalam forum pertemuan tahunan *Governors Climate and Forest (GCF) Taskforce* sejak tahun 2009. Pertemuan tersebut dilaksanakan berturut-turut di California, Matto Gruso-Brasil, Palangka Raya-Indonesia, Rio de Janeiro-Brasil, Santo Christobal-Meksiko. Forum pertemuan tahunan GCF di California melahirkan *Call for Leadership* yakni sebuah himbauan kepada pemimpin dunia untuk mengambil peran lebih progresif dalam upaya pencegahan pemanasan global. GCF dimaksudkan untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi untuk lapangan kerja hijau, meningkatkan penggunaan energi bersih, mengurangi polusi, menumbuhkan ekonomi hijau (*green economy*), dan mengurangi pemanasan global.

4. **Pentingnya Pengembangan Agro-Industri di Masa Depan**

Dalam perekonomian nasional, umumnya sektor pertanian secara tradisional dikenal sebagai sektor penting sebagai sumber utama pangan dan pertumbuhan ekonomi. Peranan sektor ini di Provinsi Kalimantan Timur masih perlu ditingkatkan produktivitasnya, mengingat semakin langkanya dan menurunnya sumberdaya alam, seperti pertambangan,

kehutanan, dan perkebunan, sementara di Provinsi Kalimantan Timur. Masa depan Provinsi Kalimantan Timur tidak boleh bergantung pada SDA semata. Kedepan transformasi ekonomi Provinsi Kalimantan Timur pengembangan industri agroindustri menjadi alternatif mengingat luasnya wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan potensi-potensi pendukungnya cukup tersedia. Pengembangan sektor ini diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan, penciptaan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan daerah, dan menciptakan ekspor non migas yang memberikan nilai tambah perekonomian daerah.

Pengembangan agroindustri merupakan bagian (subsistem) dari agribisnis secara lebih luas. Adanya pengembangan industrialisasi sektor pertanian tersebut akan diikuti dengan pembangunan infrastruktur, transportasi, komunikasi dan kelembagaan sosial yang secara alami dapat meningkatkan daya tarik investasi. Implikasinya terhadap kegiatan ekonomi masyarakat adalah hasil produksi dari pusat pertumbuhan tersebut, dipakai oleh kegiatan ekonomi yang berada daerah sekitar (*hinterland*), sedangkan sisi lainnya adalah produksi hasil daerah *hinterland* tersebut juga dipakai untuk kegiatan ekonomi yang ada di pusat pertumbuhan. KIPI Maloy merupakan salah satu implementasi terpenting konsep agroindustri.

Masing-masing sektor memiliki potensi dan keunggulan tersendiri dan saling berkaitan. Disinilah titik awal pergerakan ekonomi, keunggulan masing-masing kawasan industri, akan melahirkan suatu keterhubungan/interkoneksi, yang akan berlanjut pada ketergantungan/interpendensi, hingga interelasi antar kawasan industri, khususnya pusat-pusat unggulan pertanian yang akan dikoneksikan dengan manufakturnya. Diharapkan keberhasilan pembangunan sektor-sektor ini merupakan representasi dari wajah pembangunan masa depan Provinsi Kalimantan Timur yang berdaya saing dan berkelanjutan. Pendekatan ini digunakan karena diyakini akan memberikan dampak positif terhadap beberapa antara lain harus dapat mewujudkan agroindustri. Aspek penting dalam pergerakan roda perekonomian, diantaranya peningkatan nilai tambah, produktivitas, inovasi, serta memperluas lapangan pekerjaan.

5. Kelangkaan BBM dan Daya Listrik yang Tak Kunjung Terpecahkan

Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik di tengah-tengah masyarakat akhir-akhir ini menjadi masalah sosial yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Listrik merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang kebutuhan hidup, selain sebagai alat penerangan juga mendukung untuk mendapatkan informasi serta pengembangan teknologi. Belum tercukupinya kuota listrik dan BBM pada sebagian wilayah Provinsi Kalimantan Timur menyebabkan pembangunan terhambat. Energi listrik merupakan energi yang terbaharukan dimana proses produksi listrik perusahaan masih menggunakan sumber energi listrik fosil. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan sekarang ini banyak ditemukan sumber-sumber energi yang dapat diolah menjadi sumber energi listrik. Namun kurangnya produksi listrik menyebabkan pemadaman-pemadaman dilakukan di beberapa wilayah sebagai antisipasi meningkatnya konsumsi listrik rumah tangga.

Sedangkan kelangkaan BBM dapat dilihat dari panjangnya antrian di setiap SPBU yang berdampak pada kemacetan. Hal ini menyebabkan penyelewengan-penyelewengan dalam pendistribusian BBM ke masyarakat. Masih maraknya para pengetap BBM dan belum mendapatkan tindakan tegas oleh petugas merupakan salah satu bentuk permasalahan pasca langkanya BBM. Persoalan antrian BBM tersebut di Provinsi Kalimantan Timur sangat berpotensi memicu terjadinya konflik di masyarakat, kedepan diperlukan upaya yang sangat serius dari pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut.

Kondisi kelangkaan BBM dan listrik ini sangat kontras dengan kontribusi yang diberikan Provinsi Kalimantan Timur dalam hal sumber daya alam. Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur merasa dianaktirikan oleh pemerintah pusat baik dari segi pemerataan listrik maupun infrastruktur dan kuota BBM. Dalam hal ini, peran aktif Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengatasi masalah tersebut sangat dibutuhkan.

6. Komitmen Atas Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi

Di Indonesia, kejahatan korupsi sepanjang sejarah telah dijadikan musuh bersama dan bahkan perang terhadap praktik korupsi makin *booming* terdengar dikalangan politisi, pejabat publik, LSM, dan juga partai politik. Bila dicermati, hampir tidak ada pemimpin yang tidak secara terbuka menyatakan unitnya untuk memberantas korupsi dan tidak ada parpol satupun pro terhadap korupsi. Komitmen seluruh stakeholder terhadap setiap upaya pemberantasan korupsi oleh penegak hukum menjadi mutlak diperlukan dalam kesuksesan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Sebagai provinsi yang dikenal memiliki kekayaan alam melimpah, penyelenggaraan pemerintahan banyak disorot karena memiliki peluang untuk melakukan penyimpangan pengelolaan keuangan daerah. Pemerintahan daerah harus mengantisipasinya adanya penyimpangan dengan memperkuat sikap politik dalam penegakan hukum yang baik. Korupsi sebagai kejahatan kemanusiaan yang bisa membangkrutkan keuangan daerah serta merupakan pelanggaran ekonomi, sosial dan budaya, harus dihadapi dengan cara yang luar biasa. Tingginya komitmen dari stakeholder di Provinsi Kalimantan Timur sangat diperlukan dalam pemberantasan korupsi demi pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur yang lebih baik.

Menuju pembangunan pemerintah "*Good Governance*" pemberantasan korupsi dapat ditekan dengan melibatkan peran serta masyarakat Provinsi Kalimantan Timur dengan ikut aktif mengawasi dan tidak bersikap permisif terhadap korupsi dan menunjukkan perilaku yang tidak koruptif. Pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan perbaikan sistem (reformasi birokrasi yang mendorong *good governance*), pelaporan LHKPN, menjalankan kode etik profesi yang diawasi dengan baik, pendidikan dan kampanye anti korupsi, hingga melakukan penertiban aset negara. Dengan reformasi birokrasi harus terus dijalankan, kemudian perlu dilakukan pengawasan aktif dalam penganggaran terutama pada proses pengelolaan keuangan yang di setiap tahapannya ada

peluang korupsi, mempertahankan temuan-temuan kegiatan positif dari KORSUPGAH (tim koordinasi dan supervisi pencegahan) dan melakukan tindak lanjut yang tegas dengan rencana aksi jika ada temuan negatif. Dalam rangka memberantas dan melakukan segala upaya dalam pencegahan korupsi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur hendaknya meningkatkan integritas diri dan integritas lembaga yang menuju pada wilayah (zona) bebas korupsi yang dilakukan seluruh pejabat Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini bertujuan sebagai pengingat akan kesadaran anti-korupsi sehingga akan menuju Provinsi Kalimantan Timur yang berkeadilan dan sejahtera.

7. Koordinasi Yang Lemah Antara Provinsi dan Kabupaten/Kota Dalam Pengendalian Ijin Eksploitasi

UU Minerba menggariskan kewenangan eksklusif pusat dalam hal:

- a. Penetapan kebijakan nasional,
- b. Pembuatan peraturan perundang-undangan,
- c. Penetapan standar, pedoman, dan kriteria,
- d. Penetapan sistem perijinan pertambangan minerba nasional, dan
- e. Penetapan wilayah pertambangan setelah berkoordinasi dengan Pemda dan berkonsultasi dengan DPR.

Diluar itu, jenis-jenis kewenangan (terutama ihwal perijinan) antar pusat, provinsi, dan kabupaten/kota bersubstansi sama dan hanya berbeda dalam skala cakupan wilayah:

1. Pemerintah daerah kabupaten/kota dalam kabupaten/kota tersebut dan wilayah laut sampai 4 mil;
2. Pemerintah provinsi untuk wilayah lintas kabupaten/kota dan wilayah laut sampai 4-12 mil; dan
3. Pemerintah pusat untuk wilayah lintas provinsi dan wilayah laut di atas 12 mil dari garis pantai.

Pembagian semacam ini juga sesuai dengan garis PP No. 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan.

8. Peningkatan Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan

Pulau Kalimantan dimana Provinsi Kalimantan Timur berada, merupakan pulau yang sebagian besar berupa daratan dengan lahan-lahan potensial dalam bidang pertanian sebagai bahan pokok pangan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam menyikapi isu/permasalahan yang akan datang tentang kurangnya ketersediaan bahan pokok pangan, membuat Provinsi Kalimantan Timur harus mulai mewaspadaikan dan menyalurkan ketahanan pangan daerah. Ketahanan pangan merupakan permasalahan yang krusial karena hal ini akan memberi dampak pada sektor-sektor yang sedang berjalan. Ketahanan pangan menurut UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, diartikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Dengan adanya

hal itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 tahun 2002 tentang ketahanan pangan, yang menyatakan bahwa penyediaan pangan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Ancaman ketahanan pangan ini berdasarkan perkembangan yang kurang baik pada bidang sektor pertanian Provinsi Kalimantan Timur yang perkembangannya fluktuatif dan isu terbaru dengan adanya Simposium *International The 5th Head of research Councils in Asia (ASIAHORCs)* di Bali. Dalam simposium ini membahas solusi untuk menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkontribusi terhadap ketersediaan pangan di Asia. Pertumbuhan pendapatan yang tinggi di banyak negara Asia, dapat mendorong pergeseran konsumsi makanan ke arah yang lebih sehat sehingga diprediksi kebutuhan makanan sehat akan meningkat tajam dan mengancam ketahanan pangan. Selain itu, ancaman lain datang dari sisi demografi seperti penduduk negara-negara berkembang di Asia diperkirakan meningkat 3,6 hingga 4,5 miliar jiwa sejak 2010 hingga 2050.

Permasalahan ketahanan pangan ini dapat mengancam wilayah Provinsi Kalimantan Timur dikarenakan berkurangnya lahan pertanian yang potensial dan bahan pangan yang dialihfungsikan. Hal ini terkait dengan pengalihan fungsi lahan yang potensial terhadap bahan pangan menjadi lahan untuk sektor perkebunan (sawit) dan sektor pertambangan (batu bara). Hal ini dikarenakan tingginya permintaan pasar domestik dan dunia terhadap CPO (*Crude Palm Oil*) serta batu bara yang didukung oleh potensi besar pada wilayah Provinsi Kalimantan Timur sehingga hal ini menjadi alasan utama alih fungsi lahan pertanian pangan. Selain pada masalah lahan, Keterjangkauan dan kesinambungan penyediaan pangan perlu alur pendistribusian yang didukung dengan infrastruktur memadai sehingga memperlancar pendistribusian pangan dari produsen ke konsumen.

Peran aktif pemerintah dan masyarakat khususnya Provinsi Kalimantan Timur sangat diperlukan dalam mewujudkan ketahanan pangan yang tangguh melalui penciptaan iklim yang kondusif bagi berfungsinya subsistem ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan secara sinergi. Jika semua program berjalan semestinya, maka Provinsi Kalimantan Timur akan mampu meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan.

9. Pencapaian MDG's

Konsep MDG's pada intinya bertujuan untuk membawa pembangunan ke arah yang lebih adil bagi semua pihak, baik untuk manusia dan lingkungan hidup, bagi laki-laki dan perempuan, bagi orangtua dan anak-anak, serta bagi generasi sekarang dan generasi mendatang. Konsep tersebut muncul dengan pemikiran bahwa ada beberapa hal yang menjadikan masyarakat tetap rentan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu, ditetapkan delapan tujuan beserta target-target yang diharapkan mampu membantu masyarakat keluar dari persoalan-persoalan pokok kehidupan.

10. Pencapaian MP3EI

Sesuai dengan kondisi sumber daya dan geografis Pulau Kalimantan, tema pengembangan koridor Kalimantan dalam MP3EI adalah sebagai Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang dan Lumbung Energi Nasional. Hal ini tercermin dalam daftar rencana investasi *fast-track* MP3EI yang didominasi oleh kegiatan-kegiatan ekonomi utama energi (migas dan batubara) dan mineral (bauksit dan besi baja). Adapun kegiatan-kegiatan ekonomi utama di dalam koridor ekonomi Kalimantan akan berpusat pada empat pusat ekonomi yakni Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda yang terkoneksi melalui jalur penghubung koridor.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa penopang utama perekonomian Kalimantan adalah sektor migas dan pertambangan yang berkontribusi sekitar 50 persen dari total PDRB Kalimantan. Namun demikian, terdapat beberapa kendala terkait pengembangan perekonomian yang dihadapi oleh koridor ekonomi Kalimantan antara lain:

- a. Penopang utama perekonomian Kalimantan yakni sektor migas dan pertambangan mengalami penurunan nilai PDRB sehingga harus secara intensif dilakukan pengembangan pada sektor-sektor lain guna mengimbangi penurunan sektor utama tersebut;
- b. Terdapat disparitas pembangunan antar wilayah di dalam koridor, baik antara wilayah penghasil migas dengan non penghasil migas maupun antara kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan;
- c. Terdapat kesenjangan antara infrastruktur pelayanan dasar yang tersedia dengan yang dibutuhkan. Infrastruktur dasar yang dimaksud mencakup infrastruktur fisik seperti jalan, listrik, akses air bersih, dan lain-lain, serta infrastruktur non-fisik (sosial) seperti pendidikan dan layanan kesehatan; dan
- d. Realisasi investasi pembangunan di Koridor Kalimantan yang sejauh ini masih tergolong rendah.